

# BAGIAN ANGGARAN 087



**LAPORAN KEUANGAN**  
**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012  
(AUDITED)

*Jl. Ampera Raya No.7 Cilandak Jakarta Selatan*

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ANRI mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada ANRI. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 6 Mei 2013  
Sekretaris Utama,

ttd

**Gina Masudah Husni**  
NIP 19550701 198303 2 001



## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 6 Mei 2013

Plt. Kepala,

ttd

**Gina Masudah Husni**  
NIP 19550701 198303 2 001

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KEUANGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2012 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2012, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Arsip Nasional Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 6 Mei 2013

Inspektur,

ttd

**Andi Kasman**

NIP. 19650830 199303 1 001

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar.....	I
Pernyataan Tanggung Jawab.....	ii
Pernyataan Telah Direviu.....	lii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Lampiran.....	vi
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Catatan atas Laporan Keuangan.....	5
A. Penjelasan Umum.....	5
A.1. Dasar Hukum.....	5
A.2. Kebijakan Teknis.....	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	31
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	31
B.2. Belanja Negara.....	33
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	40
C.1. Aset Lancar.....	40
C.2. Aset Tetap.....	45
C.3. Piutang Jangka Panjang.....	51
C.4. Aset Lainnya.....	54
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	54
C.6. Ekuitas Dana Lancar.....	55
C.7. Ekuitas Dana Investasi.....	56
D. Pengungkapan Penting Lainnya.....	56
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.....	56
D.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual .....	64
D.3. Rekening Pemerintah .....	65
D.4. Pengungkapan Lain-lain .....	65
Laporan-laporan Pendukung	
LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
Neraca Percobaan	
Laporan Barang Pengguna	
Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK	
Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	



	<b>Hal</b>
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011	2
Tabel 3 : Rencana Kinerja Tahunan ANRI TA 2012	22
Tabel 4 : Penggolongan Kualitas Piutang	30
Tabel 5 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan	31
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2012 dan 2011	32
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2012	33
Tabel 8 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Belanja TA 2012	34
Tabel 9 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Satker Pusat TA 2012	34
Tabel 10 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Satker Daerah TA 2012	34
Tabel 11 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Satker Dekonsentrasi TA 2012	35
Tabel 12 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Satker Dekonsentrasi TA 2012 per Satker	35
Tabel 13 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011	37
Tabel 14 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 dan 2011	37
Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan 2011	38
Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011	39
Tabel 17 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satker	40
Tabel 18 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	40
Tabel 19 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Satker	41
Tabel 20 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	41
Tabel 21 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	42
Tabel 22 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker	42
Tabel 23 : Rincian Penyeteroran Kas di Kas Lainnya dan Setara Kas	42
Tabel 24 : Rincian Penyisihan Putang Tak Tertagih Bukan Pajak	43
Tabel 25 : Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per Satker	43
Tabel 26 : Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	45
Tabel 27 : Rincian Persediaan	45
Tabel 28 : Rincian Aset Tetap	46
Tabel 29 : Rincian Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per Eselon I	51
Tabel 30 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	53
Tabel 31 : Rincian Aset Lainnya	53
Tabel 32 : Rincian Aset Tak Berwujud Per Eselon I	53
Tabel 33 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	54

**RINGKASAN**

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2012 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2012 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.863.573.309,00 atau mencapai 113,62 % dari estimasi pendapatan sebesar Rp6.921.083.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp122.172.427.640,00 atau mencapai 80,59 % dari alokasi anggaran sebesar Rp151.599.942.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 1  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011*

Uraian	TA 2012			TA 2011
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	6.921.083.000,00	7.863.573.309,00	113,62	6.999.083.155,00
Belanja Negara	151.599.942.000,00	122.172.427.640,00	80,59	140.757.712.927,00

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2012 dan 2011.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp585.821.163.702,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.932.086.085,00, Aset Tetap sebesar Rp569.940.089.786,00, Piutang Jangka Panjang Rp1.966.307,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp12.947.021.524,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp2.375.151.749,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp583.446.011.953,00, yang terdiri atas Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp556.934.336,00, dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp582.889.077.617,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 2*  
*Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011*

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/ (penurunan)	
	31 Des 2012 (Rp)	31 Des 2011 (Rp)	(Rp)	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	2.932.086.085	1.476.675.376	1.455.410.709	98,56
Aset Tetap	569.940.089.786	562.006.936.786	7.933.153.000	1,41
Piutang Jangka Panjang	1.966.307	0	1.966.307	0,00
Aset Lainnya	12.947.021.524	19.606.851.224	(6.659.829.700)	(33,97)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>585.821.163.702</b>	<b>583.090.463.386</b>	<b>2.730.700.316</b>	<b>0,47</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	2.375.151.749	1.946.901.755	428.249.994	22,00
<b>Ekuitas Dana</b>				
Ekuitas Dana Lancar	556.934.336	(470.226.379)	1.027.160.715	(218,4)
Ekuitas Dana Investasi	582.889.077.617	581.613.788.010	1.275.289.607	0,22
Jumlah Ekuitas Dana	583.446.011.953	581.143.561.631	2.302.450.322	0,40
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>585.821.163.702</b>	<b>583.090.463.386</b>	<b>2.730.700.316</b>	<b>0,47</b>

## 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

Uraian	Catatan	TA 2012			TA 2011
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	<b>B.1</b>	6.921.083.000	7.863.573.309	113,62	6.999.083.155
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>6.921.083.000</b>	<b>7.863.573.309</b>	<b>113,52</b>	<b>6.999.083.155</b>
<b>BELANJA</b>					
1. Belanja Pegawai	B.2.1	52.386.022.000	50.065.592.333	95,57	28.154.764.041
2. Belanja Barang	B.2.2	69.704.203.000	62.624.676.422	89,84	77.376.202.687
3. Belanja Modal	B.2.3	29.509.717.000	9.482.158.885	32,13	35.226.746.199
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>151.599.942.000</b>	<b>122.172.427.640</b>	<b>80,59</b>	<b>140.757.712.927</b>

**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NERACA PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2011
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
<b>C.1</b>			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	Rp 11.940.000	Rp 341.292.393
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	Rp 343.000.000	Rp 16.482.806
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	Rp 1.681.755.000	Rp 254.719.000
Jumlah Kas dan Bank		Rp 2.036.695.000	Rp 612.494.199
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	Rp 223.150.531	Rp -
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.5	Rp (1.115.752)	Rp -
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6	Rp 2.964.288	Rp -
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TGR	C.1.7	Rp (14.821)	Rp -
Jumlah Piutang (Bersih)		Rp 224.984.246	Rp -
Persediaan	C.1.8	Rp 670.406.839	Rp 864.181.177
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>Rp 2.932.086.085</b>	<b>Rp 1.476.675.376</b>
<b>Aset Tetap</b>			
<b>C.2</b>			
Tanah	C.2.1	Rp 215.554.860.396	Rp 215.554.860.396
Peralatan dan Mesin	C.2.2	Rp 157.278.538.416	Rp 153.677.534.384
Gedung dan Bangunan	C.2.3	Rp 175.871.756.557	Rp 171.740.978.274
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	Rp 13.419.676.529	Rp 13.407.489.629
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	Rp 7.815.257.888	Rp 7.626.074.103
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>Rp 569.940.089.786</b>	<b>Rp 562.006.936.786</b>
<b>Piutang Jangka Panjang</b>			
<b>C.3</b>			
TP/TGR	C.3.1	Rp 1.976.188	Rp -
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.2	Rp (9.881)	Rp -
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)</b>		<b>Rp 1.966.307</b>	<b>Rp -</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
<b>C.4</b>			
Aset Tak Berwujud	C.4.1	Rp 12.659.577.325	Rp 11.324.654.375
Aset Lain-Lain	C.4.2	Rp 287.444.199	Rp 8.282.196.849
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>Rp 12.947.021.524</b>	<b>Rp 19.606.851.224</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>Rp 585.821.163.702</b>	<b>Rp 583.090.463.386</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>C.5</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	Rp 2.020.211.749	Rp 1.589.126.556
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	Rp 11.940.000	Rp 341.292.393
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.5.3	Rp 343.000.000	Rp 16.482.806
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>Rp 2.375.151.749</b>	<b>Rp 1.946.901.755</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>Rp 2.375.151.749</b>	<b>Rp 1.946.901.755</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>C.6</b>			
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>			
Cadangan Piutang	C.6.1	Rp 224.984.246	Rp -
Cadangan Persediaan	C.6.2	Rp 670.406.839	Rp 864.181.177
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6.3	Rp (338.456.749)	Rp (1.334.407.556)
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>Rp 556.934.336</b>	<b>Rp (470.226.379)</b>
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>			
<b>C.7</b>			
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.7.1	Rp 569.940.089.786	Rp 562.006.936.786
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.7.2	Rp 12.948.987.831	Rp 19.606.851.224
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>Rp 582.889.077.617</b>	<b>Rp 581.613.788.010</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>Rp 583.446.011.953</b>	<b>Rp 581.143.561.631</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>Rp 585.821.163.702</b>	<b>Rp 583.090.463.386</b>

### III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### A. PENJELASAN UMUM

##### Dasar Hukum

#### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Nerca pada Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

## A.2. KEBIJAKAN TEKNIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Rencana Strategis

### RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

#### VISI DAN MISI

Visi dan Misi

Visi Arsip Nasional Republik Indonesia adalah “**Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa.**”

Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Arsip mengandung informasi yang berisi bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi ANRI sebagai berikut:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memberikan akses kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional;
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;

Sejalan dengan hal tersebut untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, sesuai amanat pasal 19 ayat (1) ANRI wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Disamping itu sesuai pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi. Dalam rangka pelaksanaan tugas seperti diamanatkan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa lembaga pemerintah non kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi ANRI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09A Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Tsunami Aceh, ANRI mempunyai

tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, ANRI mempunyai kewenangan :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kearsipan;
2. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan;
4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;
  - b. Penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip.

## **ORGANISASI**

### *Organisasi*

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dibantu oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Inspektorat. Pelaksanaan tugas ANRI dilaksanakan oleh satuan-satuan organisasi tersebut di atas, yaitu:

1. Sekretariat Utama, melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI.

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Hukum dan Kepegawaian;
- c. Biro Umum.

2. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri atas:

- a. Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan;
- b. Direktorat Kearsipan Pusat;
- c. Direktorat Kearsipan Daerah.

3. Deputi Bidang Konservasi Arsip, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di bidang konservasi arsip secara nasional.

Deputi Bidang Konservasi Arsip terdiri atas:

- a. Direktorat Akuisisi;
- b. Direktorat Pengolahan;
- c. Direktorat Preservasi;
- d. Direktorat Pemanfaatan.

4. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan Sistem Kearsipan Nasional.

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan terdiri dari:

- a. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan;
- b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan.

Selain itu terdapat tiga unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Inspektorat, dengan tugas sebagai berikut:

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan.
2. Pusat Jasa Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program di bidang jasa kearsipan.
3. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan ANRI posisi per **31 Desember 2012** adalah sebagai berikut :

1. Kepala : M. Asichin
2. Sekretaris Utama : Gina Masudah Husni
3. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan (Plt) : Dini Saraswati
4. Deputi Bidang Konservasi Arsip : Mustari Irawan
5. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan : Dini Saraswati

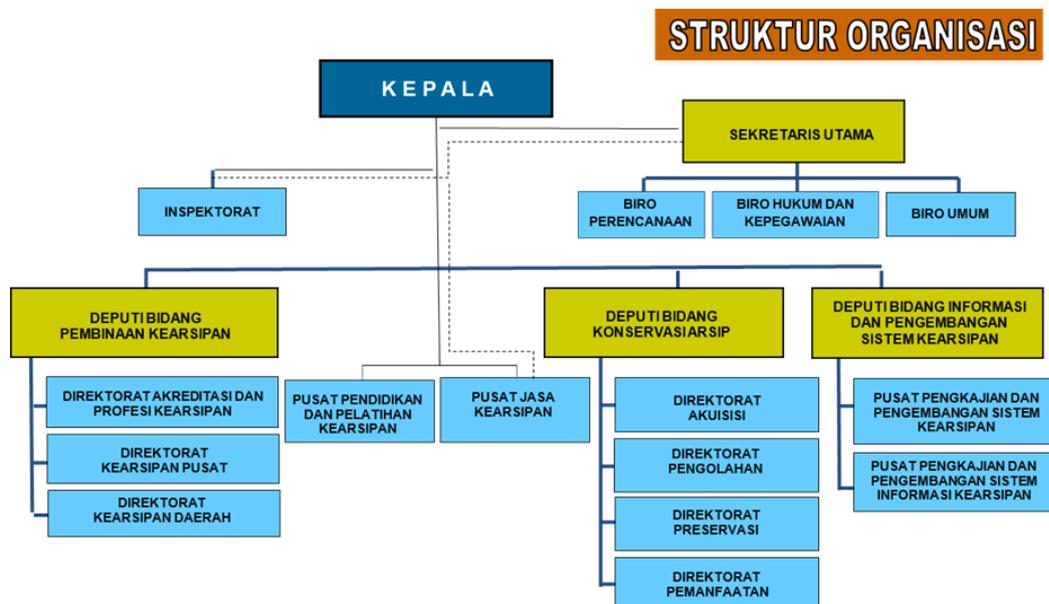
Sumber daya manusia yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada ANRI posisi per 31 Desember 2012 adalah sebanyak 518 orang.

Jumlah pegawai secara kualitas dan kuantitas dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	%
<b>I</b>	<b>JABATAN</b>		
	<i>STRUKTURAL :</i>		
	- Eselon I	4 Orang	0,77
	- Eselon II	15 Orang	2,90
	- Eselon III	40 Orang	7,72
	- Eselon IV	50 Orang	9,65
	<i>JUMLAH STRUKTURAL</i>	<i>115 Orang</i>	<i>14,11</i>
<b>II</b>	<b>FUNGSIONAL :</b>		
	- Arsiparis	160 Orang	19,63
	- Perancang Peraturan Perundang-undangan	1 Orang	0,19
	- Perencana	3 Orang	0,58
	- Analis Kepegawaian	6 Orang	1,16
	- Auditor	8 Orang	1,54
	- Widyaiswara	4 Orang	0,77
	- Peneliti	1 Orang	0,19
	- Pustakawan	2 Orang	0,39
	- Pranata Komputer	21 Orang	4,05
	- Perawat	1 Orang	0,19
	- Penerjemah	1 Orang	0,19
	<i>JUMLAH FUNGSIONAL</i>	<i>205 Orang</i>	<i>39,58</i>
<b>III</b>	<b>NON STRUKTURAL :</b>		
	- Staf	204 Orang	39,38
	<i>JUMLAH NON STRUKTURAL/FUNGSIONAL</i>	<i>204 Orang</i>	<i>39,38</i>
	<i>JUMLAH</i>	<i>204 Orang</i>	<i>39,38</i>
<b>IV</b>	<b>GOLONGAN</b>		
	- Gol. IV	91 Orang	17,57
	- Gol. III	322 Orang	62,16
	- Gol. II	105 Orang	20,27
	<i>JUMLAH</i>	<i>518 Orang</i>	<i>100,00</i>
<b>V</b>	<b>PENDIDIKAN</b>		
	- Strata 3 (S3)	1 Orang	0,19
	- Strata 2 (S2)	70 Orang	13,51

NO	URAIAN	JUMLAH	%
	- Strata 1 (S1)	251 Orang	48,46
	- Diploma /Sarmud	1 Orang	0,19
	- SLTA	105 Orang	20,27
	- SLTP	4 Orang	0,77
	- SD	- Orang	0,0
	<b>JUMLAH</b>	<b>518 Orang</b>	<b>100,0</b>

Adapun struktur organisasi ANRI sebagai berikut :



## RENCANA STRATEGIS

### Rencana Strategis

Pada hakikatnya rencana strategis merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui program dan kegiatan kebijakan pembinaan, penataan, perbaikan, penerbitan, penyempurnaan, dan pembaharuan terhadap sistem, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Di dalam mewujudkan visi dan misi ANRI, sesuai dengan tugas dan fungsi ANRI serta kewenangan yang ada, ANRI telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah di bidang kearsipan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:

## **1. Tujuan**

Sesuai dengan tugas dan fungsi, visi dan misi ANRI, tujuan pembangunan bidang kearsipan adalah :

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai Penyelenggara Kearsipan Nasional serta tersedianya kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah oleh ANRI;
- b. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta terwujudnya kepentingan perlindungan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat;
- c. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- d. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan demi keselamatan aset-aset nasional dan keamanan identitas dan jati diri bangsa.

## **2. Sasaran Strategis**

Fokus prioritas Pembangunan Kearsipan Jangka Menengah yang tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 01 Tahun 2010 adalah mengembangkan manajemen arsip/dokumen negara yang modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan kearsipan 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) dengan target kinerja:
  - 1) Tersedianya hasil kajian penyelenggaraan kearsipan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi;
  - 2) Terbangunnya Sistem Informasi Kearsipan Statis yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKS-TIK) di lembaga kearsipan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
  - 3) Terbangunnya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) di lembaga kearsipan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

- b. Terwujudnya pembinaan kearsipan yang efektif dan efisien secara nasional dengan target kinerja :
- 1) Tersedianya arsiparis yang kompeten dan pengelola arsip yang profesional dan sejahtera;
  - 2) Tersedianya peraturan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi SDM kearsipan;
  - 3) Terakreditasinya lembaga dan unit kearsipan serta tersertifikasinya arsiparis di pusat dan daerah;
  - 4) Tersedianya kebijakan nasional pembangunan kearsipan di pedesaan;
  - 5) Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKS-TIK) dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) di lembaga kearsipan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota;
  - 6) Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan di lembaga negara/badan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen Negara secara efektif dan efisien dengan target kinerja:
- 1) Terselamatkan dan terlestarikannya arsip/dokumen negara yang bernilai pertanggungjawaban nasional seperti arsip pemilu legislatif dan presiden serta pilkada;
  - 2) Meningkatnya pengolahan arsip demi terwujudnya inventarisasi arsip yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik;
  - 3) Meningkatnya preservasi arsip demi terwujudnya pemeliharaan, penataan dan keamanan arsip dari bahaya kerusakan fisik maupun informasinya;
  - 4) Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip untuk kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan; Pemanfaatan gedung Gajah Mada sebagai pusat kajian dan informasi arsip atau "Center of Excellent for VOC Archives";
  - 5) Meningkatnya jumlah instansi/lembaga yang menggunakan jasa kearsipan.

Sedangkan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian ketiga sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran pendukung yaitu:

- a. Terwujudnya efektivitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, peraturan perundang-undangan kearsipan serta pembinaan dan pelayanan administrasi dan sumber daya di lingkungan ANRI” dengan target kinerja :
  - 1) Terwujudnya kebijakan kearsipan nasional berupa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - 2) Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu;
  - 3) Meningkatnya jumlah peraturan kearsipan;
  - 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kearsipan;
  - 5) Berkurangnya jumlah temuan dalam pengawasan internal.
- b. Terwujudnya efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip dengan target kinerja :
  - 1) Tersedianya sarana penyimpanan dan pemeliharaan serta perawatan dalam rangka pelestarian arsip yang memadai dan memenuhi standar kondisi lingkungan yang aman untuk menjamin keselamatan dan keutuhan arsip; Terwujudnya penambahan pembangunan gedung depo penyimpanan arsip secara bertahap;
  - 2) Terwujudnya security system pada gedung depo penyimpanan arsip dan ruang layanan arsip statis yang sesuai standar internasional;
  - 3) Terwujudnya ruang baca layanan arsip statis yang memenuhi standar internasional (ISO-9001 series 2008) dalam rangka peningkatan mutu layanan kearsipan.

### **3. Pencapaian Sasaran Strategis Pertama**

Untuk mencapai sasaran pertama yaitu terwujudnya pengelolaan arsip yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan aparaturnegara, maka ditetapkan strategi dan kebijakan :

#### **a. Strategi**

Untuk mencapai sasaran pertama sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Menghasilkan kajian kebijakan tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) kearsipan yang dapat menjadi pedoman implementasi bagi para perencana dan pengambil keputusan, baik

pemerintah, swasta, maupun masyarakat;

- 2) Mengembangkan kegiatan pengkajian dan pengembangan serta mendukung program pendidikan lanjutan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia;
- 3) Menciptakan dan mengembangkan paket teknologi dan model sistem informasi kearsipan sebagai salah satu kontribusi lembaga bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan kearsipan nasional;
- 4) Mengembangkan diri sebagai pusat unggulan melalui diseminasi dan sosialisasi hasil kajian serta menciptakan jaringan dan peluang kerja sama;
- 5) Melaksanakan kegiatan secara optimal agar mampu memberikan outcome terbaik bagi lembaga sebagai salah satu bentuk keprofesionalan ANRI;
- 6) Memberikan informasi layanan kearsipan secara prima kepada individu, swasta, masyarakat maupun pemerintah.

**b. Kebijakan**

- 1) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan nasional;
- 2) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan;
- 4) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan jaringan informasi kearsipan nasional;
- 5) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan teknologi kearsipan;
- 6) Mendorong seluruh komponen, baik sistem, data, prasarana dan sarana guna mencapai layanan kearsipan yang prima.

**4. Pencapaian Sasaran Strategis Kedua**

Untuk mencapai sasaran kedua yaitu terwujudnya usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

**a. Strategi**

Untuk mencapai sasaran ke dua sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan supervisi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dan daerah, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan partai politik;
- 2) Melaksanakan bimbingan dan konsultasi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dan daerah, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta, serta masyarakat luas;
- 3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kearsipan bagi semua komponen bangsa;
- 4) Melaksanakan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan sertifikasi lembaga dan unit kearsipan serta SDM kearsipan;
- 5) Melaksanakan pengembangan jabatan fungsional arsiparis.

**b. Kebijakan**

- 1) Mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan supervisi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dan daerah, lembaga pendidikan, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan partai politik melalui pengembangan mekanisme supervisi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung supervisi yang lebih komprehensif dan peningkatan peran SDM secara partisipatif baik dari ANRI maupun dari instansi yang di supervisi;
- 2) Mendorong peningkatan kualitas bimbingan dan konsultasi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dan daerah, lembaga pendidikan, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan partai politik melalui pengembangan mekanisme bimbingan dan konsultasi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung bimbingan dan konsultasi yang lebih komprehensif;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan bagi semua komponen bangsa melalui peningkatan kualitas kurikulum, metodologi pengajaran serta kualitas pengajar;
- 4) Mendorong peningkatan kualitas akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan sertifikasi lembaga dan unit kearsipan serta SDM kearsipan melalui ketersediaan pedoman dan instrumen pendukung penilaian akreditasi dan sertifikasi, peningkatan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait yang

mempunyai otoritas mengeluarkan penilaian akreditasi maupun sertifikasi ;

- 5) Mendorong peningkatan kualitas pejabat fungsional arsiparis melalui pelaksanaan diklat/kursus kearsipan, upaya peningkatan tunjangan/kesejahteraan arsiparis dan batas usia pensiun arsiparis sampai usia 60 tahun.

## **6. Pencapaian Sasaran Strategis Ketiga**

Untuk mencapai sasaran ketiga yaitu terwujudnya usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara secara efektif dan efisien, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

### **a. Strategi**

Untuk mencapai sasaran ketiga sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategi di bidang penyelamatan dan pelestarian arsip dan menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dengan lembaga negara/lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi massa, dan partai politik;
- 2) Membuat standar minimal pengolahan arsip (deskripsi arsip) dari seluruh jenis media arsip baik yang konvensional maupun media baru dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses arsip statis yang diinginkan;
- 3) Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik dengan tersedianya *server storage* arsip statis hasil alih media arsip menjadi format digital yang memuat seluruh khasanah arsip statis yang tersimpan dan meningkatkan perawatan dan atau pemeliharaan arsip sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dalam rangka mempertahankan kondisi fisik arsip, guna melestarikan nilai guna arsip yang terkandung di dalamnya;
- 4) Meningkatkan promosi pemanfaatan arsip baik melalui penerbitan naskah sumber arsip maupun pameran arsip yang diselenggarakan untuk penyebaran informasi arsip kepada masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak

baik di lingkungan ANRI maupun di luar lingkungan ANRI dalam mengembangkan pemanfaatan arsip;

- 5) Meningkatkan promosi layanan Pusat Jasa Kearsipan pada instansi pemerintah dan swasta;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan oleh Pusat Jasa Kearsipan dalam pembenahan arsip di instansi pemerintah maupun swasta.

#### **b. Kebijakan**

- 1) Mendorong peningkatan kualitas kinerja termasuk kualitas hasil penyelamatan dan pelestarian arsip melalui analisis kebijakan, pengkajian dan prakarsa strategi di bidang kearsipan dan peningkatan kualitas koordinasi pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk sinkronisasi dan sinergi antara program dan anggaran;
- 2) Mempersiapkan sistem deskripsi untuk arsip elektronik sebagai persiapan kemungkinan penyerahan arsip elektronik agar dapat diakses oleh pengguna dan mendukung program *Centre of Excellence* sebagai wujud dari *Memory of The World* dari khasanah arsip statis masa VOC yang rencananya dibuatkan sistem dan akan digitalisasi sehingga dapat terhubung secara internasional. Dalam hal ini arsip VOC dalam 5 tahun mendatang sudah dibuatkan jalan masuknya baik dalam bentuk daftar arsip ataupun inventaris, sementara sistem aplikasinya disiapkan oleh *Nationale Archief Nederland (NAN)* Belanda;
- 3) Mendorong terwujudnya penyelamatan dan pelestarian arsip melalui alih media arsip sesuai skala prioritas dan mendorong terlaksananya pemeliharaan dan perawatan arsip secara baik dan benar, sesuai standar dan prosedur yang berlaku;
- 4) Memenuhi standar pemanfaatan arsip kepada masyarakat dengan meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pemanfaatan arsip yang diperlukan dan meningkatkan kemudahan akses pemanfaatan arsip kepada masyarakat;
- 5) Peningkatan kualitas layanan Pusat Jasa Kearsipan pada instansi pemerintah dan swasta.

### **7. Pencapaian Sasaran Pendukung**

Untuk mencapai sasaran 2 (dua) sasaran pendukung yaitu:

7.1 Terwujudnya efektivitas koordinasi perencanaan, program dan kegiatan, peraturan perundang-undangan kearsipan serta pembinaan dan pelayanan administrasi dan sumber daya di lingkungan ANRI, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

**a. Strategi**

Untuk mencapai sasaran pendukung sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh terhadap seluruh unit kerja dalam perencanaan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja;
- 2) Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh pada seluruh unit kerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ANRI;
- 3) Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh terhadap seluruh unit kerja dalam pengelolaan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel;
- 4) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI;
- 5) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan;
- 6) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM kearsipan melalui beasiswa S1,S2,S3, dan diklat teknis kearsipan baik di dalam maupun luar negeri;
- 7) Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh terhadap seluruh unit kerja dalam hal pengawasan internal terhadap pengelolaan APBN, kepegawaian maupun perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Kebijakan**

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan penyusunan program dan anggaran yang berbasis kinerja;
- 2) Peningkatan kualitas penyusunan laporan kinerja ANRI;
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan ketatausahaan dan kehumasan;

- 4) Peningkatan kualitas pembinaan administrasi keuangan dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 5) Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 6) Pemantapan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang kearsipan serta peningkatan kualitas dan kuantitas penyusunan produk hukum bidang kearsipan;
- 7) Peningkatan kualitas kompetensi SDM kearsipan dan layanan administrasi kepegawaian;
- 8) Peningkatan kualitas pengawasan secara efektif dan efisien terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan ANRI.

7.2 Terwujudnya efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

**a. Strategi**

- 1) Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan seluruh unit kerja terkait dalam penyediaan sarana dan prasarana perkantoran;
- 2) Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan unit kerja terkait dalam penyediaan ruang pengolahan, penyimpanan, perawatan dan layanan arsip yang memadai dan berstandar internasional.

**b. Kebijakan**

- 1) Mendorong peningkatan pemenuhan sarana penyimpanan dan pemeliharaan serta perawatan dalam rangka pelestarian arsip yang memadai dan memenuhi standar kondisi lingkungan yang aman untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip; Mendorong peningkatan pembangunan gedung depo penyimpanan arsip secara bertahap;
- 2) Meningkatkan kualitas sistem pengamanan pada gedung depo penyimpanan arsip dan ruang layanan arsip statis;
- 3) Mempercepat pencapaian standar internasional pada ruang baca layanan arsip statis dalam rangka peningkatan mutu layanan arsip statis pada masyarakat.

## RENCANA KINERJA

### Rencana Kinerja

Bertitik tolak dari sasaran Pembangunan Kearsipan Jangka Menengah yang tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis ANRI Tahun 2010-2014, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2012 secara garis besar adalah :

1. Tersusunnya 15 (lima belas) Peraturan Kepala ANRI sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis TIK (SIKD-TIK) pada 20 (dua puluh) Instansi Pusat;
3. Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada 8 (delapan) Pemerintah Daerah Provinsi dan 85 (delapan puluh lima) Instansi Pusat;
4. Terlaksananya Pengelolaan Arsip Asset pada 33 Pemerintah Daerah Provinsi;
5. Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Penyelamatan Arsip Pemilu Tahun 2009 di 1 (satu) KPU Pusat dan 7 (tujuh) KPUD Provinsi;
6. Terlaksananya Penilaian dan Akuisisi Arsip Kabinet Indonesia Bersatu di 14 (empat belas) instansi;
7. Terlaksananya Digitalisasi Arsip sebanyak 1.301 (seribu tiga ratus satu) Reel film, 80 (delapan puluh) rool microfilm, 6.000 (enam ribu) lembar, 12.476 (dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) kertas/peta;
8. Terlaksananya Digitalisasi dan up load dalam rangka *Center Of Excellent*;
9. Tersusunnya Materi Kearsipan dalam mendukung pusat studi kearsipan (*Center Of Excellent*);
10. Penyelarasan dan Evaluasi Pada Unit Kerja di ANRI terhadap 30 (tiga puluh) SOP;
11. Terselenggaranya Diklat Teknis Bagi Sekretaris Desa melalui Dana Dekonsentrasi pada 32 (tiga puluh dua) Provinsi, Diklat Penciptaan Arsiparis 2 (dua) Angkatan, Diklat Sertifikasi SDM Kearsipan 6 (enam) Angkatan dan Pelaksanaan Sertifikasi SDM Kearsipan terhadap 70 (tujuh puluh) arsiparis;
12. Tersedianya Pemberian Bantuan Beasiswa untuk Program Studi Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang, Terlaksananya Kursus/Training Dalam Negeri

- sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang untuk Kursus Bahasa Belanda, Bahasa Arab Melayu; Bahasa Jawa Kuno; Bahasa Inggris; Kursus Komputer dan kursus/training kearsipan di luar negeri sebanyak 6 (enam) orang;
13. Terlaksananya sosialisasi Diorama Sejarah Perjalananan Bangsa sebanyak 2 (dua) kali *talk show* di televisi, pembuatan iklan 1 (satu) paket, 15 (lima belas) kali penyiaran di televisi; 2 (dua) kali sosialisasi melalui media cetak; Sosialisasi melalui media elektronik (radio) sebanyak 2 (dua) kali *talk show* di radio, pembuatan iklan 1 (satu) paket dan 20 (dua puluh) kali penyiaran melalui radio;
  14. Tersusunnya materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip 1 materi;
  15. Terlaksananya pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan.

Adapun rencana kinerja tahunan ANRI tahun 2012 merupakan rencana yang bersifat operasional yang dirinci berdasarkan sistem aplikasi penyusunan anggaran, yang mengacu pada program dan kegiatan hasil restrukturisasi, serta berpedoman pada program pembangunan kearsipan yang tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis ANRI Tahun 2010-2014. Rencana kinerja tahunan ANRI tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03A Tahun 2012 tentang Rencana Kinerja Tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 3  
Rencana Kinerja Tahunan ANRI TA 2012

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
I.	Terwujudnya pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga aparatur negara	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	1 Jumlah akses arsip statis pada ANRI dan lembaga kearsipan dalam JIKN	8.760 Kali	69.068.558.000

II.	Terwujudnya usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparaturnegara		2	Jumlah pencipta arsip tingkat pusat dan daerah yang telah menerapkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dalam pengelolaan arsip	21 Instansi	
III.	Terwujudnya usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara		3	Jumlah instansi yang telah melaksanakan pemusnahan arsip sesuai dengan persetujuan pemusnahan arsip	14 instansi	
			4	Prosentase pengguna layanan arsip statis	80 %	
IV.	Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, pengendalian program, administrasi, dan sumber daya dilingkungan ANRI secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang kinerja ANRI	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ANRI	1	Presentase kepuasan layanan kunjungan diorama	80 %	49.710.431.000
			2	Skor Lakip ANRI	65	
			3	Opini audit BPK-RI	WTP	
V.	Terwujudnya efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	1	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip	100 %	34.000.000.000

Sumber : Biro Perencanaan

## PENCAPAIAN KINERJA

### Pencapaian Kinerja

Selama Tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja ANRI sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) dilingkungan lembaga aparaturnegara.

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Jumlah akses arsip statis pada ANRI dan lembaga kearsipan dalam JIKN	8.760 Kali	2.819 Kali	32%

2. Terwujudnya usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara.

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Jumlah pencipta arsip tingkat pusat dan daerah yang telah menerapkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dalam pengelolaan arsip	21 Instansi	45 Instansi (11 tingkat pusat dan 34 tingkat daerah)	214%

3. Terwujudnya usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara.

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Jumlah instansi yang telah melaksanakan pemusnahan arsip sesuai dengan persetujuan pemusnahan arsip	14 Instansi	18 Instansi (7 instansi tingkat pusat dan 11 tingkat daerah)	128%
Prosentase pengguna layanan arsip statis	80 %	88.15 %	110%

4. Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, pengendalian program, administrasi, dan sumber daya dilingkungan ANRI secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang kinerja ANRI.

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 0%
Presentase kepuasan layanan kunjungan diorama	80 %	97.3 %	121%
Skor Lakip ANRI	65	65.22 (B)	100%
Opini audit BPK-RI	WTP	WTP	100%

3. Terwujudnya efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip.

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip	100%	30%	30%

### A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

#### *Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2012 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan ANRI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedural manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan ANRI Tahun 2012 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural dibawah ANRI seperti eselon I, serta satuan kerja (Satker) yang bertanggungjawab atas anggaran yang dilaksanakan.

Jumlah satker dilingkup ANRI adalah 34 satker yang terdiri atas 1 satker Kantor Pusat/KP, 1 satker Kantor Daerah/KD dan 32 satker Dekonsentrasi/DK.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Kekayaan Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### *Kebijakan Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ANRI adalah sebagai berikut:

#### **(1) Pendapatan**

#### *Pendapatan*

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

## (2) Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

## (3) Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri atas kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

#### **b. Aset Tetap**

##### *Aset Tetap*

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012 pada harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

#### **c. Piutang Jangka Panjang**

##### *Piutang Jangka Panjang*

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang jangka panjang adalah tagihan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan

penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

#### d. Aset Lainnya

##### Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi : software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

#### (4) Kewajiban

##### Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut

hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban ini meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

## **(5) Ekuitas Dana**

### *Ekuitas Dana*

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

## **(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

### *Penyisihan Piutang Tak Tertagih*

Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian/Lembaga dan

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 4  
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

**(7) Kebijakan Akuntansi Atas Penyusutan Aset Tetap**

*Kebijakan Akuntansi  
atas Penyusutan Aset  
Tetap*

Sampai saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, ANRI belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa Penerapan Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan  
Negara dan Hibah  
Rp 7.863.573.309,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp7.863.573.309,00 atau mencapai 113,61 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 6.921.083.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 5  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan & Hasil Cetakan Lainnya	461.075.000	333.518.700	72,33
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	60.000.000	2.500.000	4,16
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	73.250.000	2.799.000.000	3.821,16
4	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Dan teknologi Sesuai Tusi Masing-masing Kementerian	425.000.000	481.500.000	113,29
5	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	10.793.000	2.055.300	19,04
6	Pendapatan Jasa Lainnya	5.868.965.000	3.237.593.535	55,16
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1.689.875	0,00
8	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	2.000.000	11.140.134	557,00
9	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	10.000.000	989.438.669	9.894,38
10	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (masuk TP/TGR) Bendahara	10.000.000	4.987.096	49,87
11	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	150.000	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.921.083.000</b>	<b>7.863.573.309</b>	<b>113,61</b>

Realisasi PNBP Lainnya TA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp864.490.154,00 atau 12,35 % dibandingkan TA 2011 yang disebabkan oleh meningkatnya kegiatan layanan arsip, pendidikan dan pelatihan kearsipan dan pengembalian belanja TAYL pada ANRI. Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6  
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011

No	Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan & Hasil Cetakan Lainnya	333.518.700	232.954.700	100.564.000	43,17
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan (akun pada tahun sebelumnya)	2.500.000	10.000.000	(7.500.000)	(75,00)
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang (akun pada tahun sebelumnya)	2.799.000.000	351.500.000	2.447.500.000	696,30
4	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan & Teknologi sesuai Tugas dan Fungsi Masing-masing Kementerian. Pendapatan Pendidikan Lainnya (akun pendapatan tahun sebelumnya)	481.500.000	327.000.000	154.500.000	47,25
5	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	2.055.300	5.195.345	(3.140.045)	(60,44)
6	Pendapatan Jasa Lainnya	3.237.593.535	5.648.265.153	(2.410.671.618)	(42,68)
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.689.875	8.459.275	(6.769.400)	(80,02)
8	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	11.140.134	57.190.109	(46.049.975)	(80,52)
9	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	989.438.669	281.648.573	707.790.096	251,30
10	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (masuk TP/TGR) Bendahara	4.987.096	76.870.000	(71.882.904)	(93,51)
11	Pendapatan Anggaran Lain-lain	150.000	-	150.000	-
<b>Jumlah</b>		<b>7.863.573.309</b>	<b>6.999.083.155</b>	<b>864.490.154</b>	<b>12,35</b>

Adapun realisasi PNBP TA 2012 meliputi:

1. PNBP Satker Kantor Pusat (ANRI Jakarta) dengan realisasi sebesar Rp 7.853.648.859,00 atau sebesar 113,47% dari estimasi pendapatan sebesar **Rp6.921.083.000,00**;

2. PNBP Satker Dekonsentrasi pada Badan/Kantor Arsip Daerah Provinsi realisasi sebesar Rp 9.924.450,00, dengan rincian :
  - a. Provinsi Jawa Tengah (0300) sebesar Rp 2.708.150,00
  - b. Provinsi Jawa Timur (0500) sebesar Rp 2.050.339,00
  - c. Provinsi Jambi (1000) sebesar Rp 4.151,00
  - d. Provinsi Lampung (1200) sebesar Rp 810,00
  - e. Provinsi Kalimantan Barat (1300) sebesar Rp 2.969.000,00
  - f. Provinsi Sulawesi Tengah (1800) sebesar Rp 150.000,00
  - g. Provinsi Bangka Belitung (3000) sebesar Rp 933.000,00
  - h. Provinsi Gorontalo (3100) sebesar Rp 1.109.000,00.

## B.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara  
Rp 22.172.427.640,00

Realisasi belanja ANRI pada TA 2012 adalah sebesar Rp122.172.427.640,00 atau sebesar 80,59 % dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran ANRI TA 2012 sebesar Rp151.599.942.000,00. Anggaran dan realisasi belanja TA 2012 menurut program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2012

Realisasi Belanja Negara Per Program

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
087.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ANRI	84.810.946.000	80.601.830.792	95,04
087.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	25.830.676.000	6.420.050.100	24,85
087.01.06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	40.958.320.000	35.150.546.748	85,82
<b>Jumlah</b>		<b>151.599.942.000</b>	<b>122.172.427.640</b>	<b>80,59</b>

Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Realisasi Belanja  
Negara Perbelanja

Tabel 8  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Belanja TA 2012

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
51	Belanja Pegawai	52.386.022.000	50.065.592.333	95,57
52	Belanja Barang	69.704.203.000	62.624.676.422	89,84
53	Belanja Modal	29.509.717.000	9.482.158.885	32,13
<b>Jumlah</b>		<b>151.599.942.000</b>	<b>122.172.427.640</b>	<b>80,59</b>

Realisasi Belanja  
Satker Pusat  
Rp115.358.694.164,00

Realisasi belanja ANRI untuk satuan kerja pusat T.A 2012 meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sebesar Rp 115.358.694.164,00 atau 79,96 % dari pagu anggaran sebesar Rp 144.270.986.000,00. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 9  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012  
Satuan Kerja Pusat

Realisasi Belanja  
Negara Persatker  
Pusat

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
51	Belanja Pegawai	52.386.022.000	50.065.592.333	95,57
52	Belanja Barang	62.694.911.000	56.120.468.491	89,51
53	Belanja Modal	29.190.053.000	9.172.633.340	31,42
<b>Jumlah</b>		<b>144.270.986.000</b>	<b>115.358.694.164</b>	<b>79,96</b>

Realisasi Belanja  
Satker Daerah  
Rp2.307.045.738,00

Realisasi belanja ANRI untuk satuan kerja daerah T.A 2012 meliputi belanja barang dan belanja modal sebesar Rp 2.307.045.738,00 atau 85,78 % dari pagu anggaran sebesar Rp 2.689.497.000,00. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 10  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012  
Satuan Kerja Daerah

Belanja Satuan Kerja  
Daerah menurut Jenis  
Belanja

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
52	Belanja Barang	2.369.833.000	1.997.520.193	84,29
53	Belanja Modal	319.664.000	309.525.545	96,83
<b>Jumlah</b>		<b>2.689.497.000</b>	<b>2.307.045.738</b>	<b>85,78</b>

Realisasi Belanja  
Satker Dana  
Dekonsentrasi  
Rp 4.506.687.738,00

Sementara realisasi belanja ANRI untuk satuan kerja dana dekonsentrasi T.A 2012 pada Badan/Kantor Kearsipan meliputi belanja barang sebesar Rp 4.506.687.738,00 atau 97,14 % dari pagu anggaran sebesar Rp 4.639.459.000,00. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Belanja Satker Dana  
Dekonsentrasi  
menurut Jenis Belanja

Tabel 11  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012  
Satuan Kerja Dekonsentrasi

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
52	Belanja Barang	4.639.459.000	4.506.687.738	97,14
<b>Jumlah</b>		<b>4.639.459.000</b>	<b>4.506.678.738</b>	<b>97,14</b>

Realisasi Belanja Per  
Satker Dana  
Dekonsentrasi

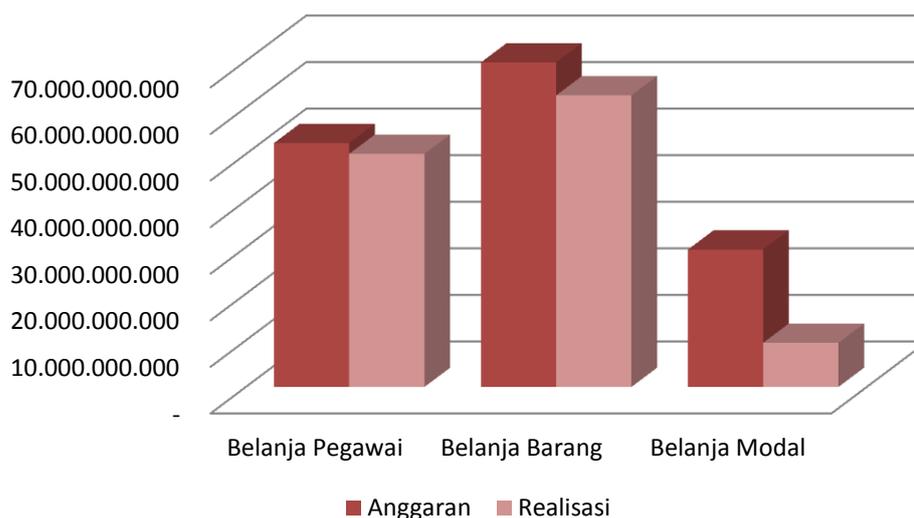
Tabel 12  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012  
Satuan Kerja Dekonsentrasi

No.	Uraian Satker	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Provinsi Jawa Barat	157.466.000	156.461.000	99,36
2	Provinsi Jawa Tengah	155.657.000	155.657.000	100,00
3	Provinsi DI. Yogyakarta	134.791.000	130.940.550	97,14
4	Provinsi Jawa Timur	147.706.000	146.918.950	99,47
5	Provinsi DI. Aceh	148.291.000	133.711.000	90,17
6	Provinsi Sumatera Utara	140.966.000	133.769.000	94,89
7	Provinsi Sumatera Barat	143.351.000	141.672.000	98,83
8	Provinsi Riau	160.031.000	154.462.600	96,52
9	Provinsi Jambi	134.417.000	128.457.000	95,57
10	Provinsi Sumatera Selatan	136.026.000	132.182.288	97,17
11	Provinsi Lampung	129.413.000	125.562.100	97,02
12	Provinsi Kalimantan Barat	139.106.000	135.849.700	97,66
13	Provinsi Kalimantan Tengah	137.171.000	133.818.100	97,56
14	Provinsi Kalimantan Selatan	147.291.000	129.056.500	87,62
15	Provinsi Kalimantan Timur	157.596.000	156.986.800	99,61
16	Provinsi Sulawesi Utara	181.846.000	178.671.000	98,25

No.	Uraian Satker	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
17	Provinsi Sulawesi Tengah	147.856.000	145.081.000	98,12
18	Provinsi Sulawesi Selatan	177.041.000	177.041.000	100,00
19	Provinsi Sulawesi Tenggara	139.951.000	139.531.000	99,70
20	Provinsi Maluku	160.066.000	159.316.000	99,53
21	Provinsi Bali	174.990.000	164.162.250	93,81
22	Provinsi Nusa Tenggara Barat	144.046.000	142.136.000	98,67
23	Provinsi Nusa Tenggara Timur	153.316.000	153.251.000	99,96
24	Provinsi Bengkulu	132.476.000	125.208.500	94,51
25	Provinsi Maluku Utara	139.576.000	139.576.000	100,00
26	Provinsi Banten	146.436.000	134.134.000	91,60
27	Provinsi Bangka Belitung	140.726.000	129.416.100	91,96
28	Provinsi Gorontalo	146.936.000	146.766.000	99,88
29	Provinsi Kepulauan Riau	146.041.000	138.016.300	94,51
30	Provinsi Papua Barat	173.716.000	173.716.000	100,00
31	Provinsi Sulawesi Barat	165.161.000	165.161.000	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.639.459.000</b>	<b>4.506.697.738</b>	<b>97,14</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik  
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012



Realisasi belanja TA 2012 mengalami penurunan sebesar Rp.18.585.285.287,00 atau 13,20 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh turunnya belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja perjalanan dan belanja modal gedung dan bangunan. Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 13  
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA 2012	TA 2011	Rp	%
51	Belanja Pegawai	50.065.592.333	28.154.764.041	21.910.828.292	77,82
52	Belanja Barang	62.624.676.422	77.376.202.687	(14.751.526.265)	(19,06)
53	Belanja Modal	9.482.158.885	35.226.746.199	(25.744.587.314)	(73,08)
<b>Jumlah</b>		<b>122.172.427.640</b>	<b>140.757.712.927</b>	<b>(18.585.285.287)</b>	<b>(13,20)</b>

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja  
sebesar  
Rp50.065.592.333,00

Realisasi belanja pegawai TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp50.065.592.333,00 dan Rp28.154.764.041,00. Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 77,82 % antara lain disebabkan kenaikan belanja gaji pokok dan tunjangan serta adanya tunjangan kinerja pegawai. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14  
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	17.511.568.180	16.140.632.680	1.370.935.500	8,49
Belanja Pembulatan Gaji PNS	349.944	398.227	(48.283)	(12,12)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.196.233.382	1.102.765.482	93.467.900	8,48
Belanja Tunj. Anak PNS	335.426.644	303.827.949	31.598.695	10,40
Belanja Tunj. Struktural PNS	1.885.850.000	1.914.876.179	(29.026.179)	(1,52)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	820.825.000	3.205.045.000	(2.384.220.000)	(74,39)
Belanja Tunj. PPh PNS	814.080.822	746.925.326	67.155.496	8,99
Belanja Tunj. Beras PNS	987.961.800	1.040.005.090	(52.043.290)	(5,00)
Belanja Uang Makan PNS	2.836.056.000	2.226.700.000	609.356.000	27,37
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	2.855.100.000	490.960.000	2.364.140.000	481,53

Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri	25.873.200	57.440.100	(31.566.900)	54,96
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri	25.873.200	57.440.100	(31.566.900)	54,96
Belanja Tunj. Umum PNS	566.755.000	669.455.000	(102.700.000)	(15,34)
Belanja Uang Lembur	386.603.000	297.416.000	89.187.000	30,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	19.852.357.522	0	19.852.357.522	0,00
Belanja Pegawai Transito	0	0	0	0,00
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>50.075.040.494</b>	<b>28.196.447.033</b>	<b>21.878.593.461</b>	<b>77,59</b>
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>9.448.161</i>	<i>41.682.992</i>	<i>(32.234.831)</i>	<i>(77,33)</i>
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>50.065.592.333</b>	<b>28.154.764.041</b>	<b>21.910.828.292</b>	<b>77,82</b>

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja  
Barang sebesar  
Rp62.624.676.422,00

Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp62.624.676.422,00 dan Rp77.376.202.687,00. Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar 19,06 persen antara lain disebabkan penurunan belanja barang non operasional, belanja jasa dan perjalanan dinas. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15  
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	4.661.072.277	2.871.329.012	1.789.743.265	62,33
Belanja Barang Non Operasional	29.626.144.923	35.686.753.863	(6.060.608.940)	(16,98)
Belanja Jasa	11.196.792.481	17.697.062.046	(6.500.269.565)	(36,73)
Belanja Pemeliharaan	4.859.478.270	5.169.256.836	309.778.566	5,99
Belanja Perjalanan Dinas	13.186.618.242	16.399.908.030	(3.213.289.788)	(19,59)
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>63.530.106.193</b>	<b>77.824.309.787</b>	<b>(14.294.203.594)</b>	<b>(18,37)</b>
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>905.429.771</i>	<i>448.107.100</i>	<i>457.322.671</i>	<i>102,06</i>
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>62.624.676.422</b>	<b>77.376.202.687</b>	<b>(14.751.526.265)</b>	<b>(19,06)</b>

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja  
Modal sebesar  
Rp9.482.158.885,00

Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp9.482.158.885,00 dan Rp35.226.746.199,00. Penurunan realisasi Belanja Modal sebesar 73,08 % antara lain disebabkan penurunan belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung bangunan. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Naik/ (Turun)	
			R	%
Belanja Modal Tanah	48.200.000	-	48.200.000	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.180.737.350	18.116.955.890	(13.936.218.540)	(76,92)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.827.254.400	13.291.312.365	(9.464.057.965)	(71,20)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	2.663.763.276	2.663.763.276	-
Belanja Modal Fisik Lainnya	1.425.967.135	1.154.714.668	271.252.467	23,49
<b>Realiasi Belanja Bruto</b>	<b>9.482.158.885</b>	<b>35.226.746.199</b>	<b>(25.744.587.314)</b>	<b>(73,08)</b>
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	-	-	-
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>9.482.158.885</b>	<b>35.226.746.199</b>	<b>(25.744.587.314)</b>	<b>(73,08)</b>

## PENGEMBALIAN BELANJA

*Pengembalian Belanja*  
*Rp914.877.932,00*

Pada periode Tahun Anggaran 2012 ANRI dalam pelaksanaan anggarannya telah mengembalikan belanja sebesar Rp 914.877.932,00 yang berasal dari pengembalian belanja Satker Kantor Pusat (KP), Satker Kantor Daerah (KD) dan Satker Dekonsentrasi (DK).

Pengembalian belanja meliputi :

1. Pengembalian belanja Satker Kantor Pusat (ANRI Jakarta) sebesar Rp874.444.870,00 pada belanja pegawai sebesar Rp 9.448.161,00 dan belanja barang Rp 864.996.709,00;
2. Pengembalian belanja Satker Kantor Daerah (BATA) sebesar Rp 36.078.950,00 berupa pengembalian belanja barang;
3. Pengembalian belanja Satker Dekonsentrasi (Dana Dekonsentrasi Kearsipan) sebesar Rp 4.354.112,00 yaitu merupakan pengembalian belanja barang pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah:
  - a. Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 3.390.712,00
  - b. Provinsi Maluku sebesar Rp 150.000,00
  - c. Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp 813.400,00.



## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

### C.1. Aset Lancar

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp11.940.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp11.940.000,00 dan Rp341.292.393,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja (Satker) adalah sebagai berikut:

Tabel 17  
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja

No	Uraian Satker	31 Desember 2012	31 Desember 2011	Kenaikan/Penurunan
1.	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp -	Rp 341.292.393	Rp (341.292.393)
2.	BPAD Prov. Banten	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 12.000.000
3.	KAD Prov. Kep. Riau	Rp (60.000)	Rp -	Rp (60.000)
	<b>Total</b>	<b>Rp 11.940.000</b>	<b>Rp 341.292.393</b>	<b>Rp (329.292.393)</b>

Kas di Bendahara pengeluaran tersebut keseluruhannya belum disetor ke rekening Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18  
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian Satker	Saldo per 31 Desember 2012	Penyetoran	Saldo
1	BPAD Prov. Banten	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 12.000.000
2	KAD Prov. Kep. Riau	Rp 6.278.800	Rp 6.338.800	Rp (60.000)
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 18.278.800</b>	<b>Rp 6.338.800</b>	<b>Rp 11.940.000</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran BPAD Prov. Banten sebesar Rp12.000.000,00 belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2012 dikarenakan Bendahara Pengeluaran belum mempertanggungjawabkan sisa UP/TUP baik dengan GU nihil maupun setor ke Kas Negara, sementara kas di Bendahara Pengeluaran KAD Prov. Kep. Riau sebesar Rp6.278.800,00 telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp6.338.800,00 (terdapat kelebihan setor sebesar Rp60.000,00). Kas di Bendahara Pengeluaran BPAD Prov. Banten telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 14 Februari 2013 dengan NTPN : 0311030903080201 sebesar Rp 12.000.000,00.

### C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp343.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp343.000.000,00 dan Rp16.482.806,00 yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 19  
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Satker

(dalam rupiah)

No	Uraian Satker	31 Desember 2012	31 Desember 2011	Kenaikan/Penurunan
1.	ANRI Jakarta	Rp 343.000.000	Rp 16.482.806	Rp 326.517.194
	<b>Total</b>	<b>Rp 343.000.000</b>	<b>Rp 16.482.806</b>	<b>Rp 326.517.194</b>

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut keseluruhannya belum disetor per 31 Desember 2012 dikarenakan tidak dapat dilakukannya penyetoran ke Bank oleh Bendahara Penerimaan sehubungan dengan hari libur, namun pada tanggal 7 Januari 2013 telah disetor ke rekening Kas Negara. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Gedung Gajah Mada dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20  
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian Satker	Saldo per 31 Desember 2012	Penyetoran 2013	No. NTPN/Tanggal	Saldo
1	ANRI Jakarta	Rp 343.000.000	Rp 343.000.000	1513020411051200 Tgl.01/07/2013	Rp -
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 343.000.000</b>	<b>Rp 343.000.000</b>		<b>Rp -</b>

### C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp 1.681.755.000,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 1.681.755.000,00 dan Rp254.719.000,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Tabel 21  
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	Jumlah
1	Uang tunai dibrankas bendahara pengeluaran	Rp 236.295.000
2	Saldo rekening bank bendahara pengeluaran	Rp 1.445.460.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.681.755.000</b>

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 22  
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker

No.	Unit Eselon I	Jenis Transaksi	Jumlah
1	ANRI Jakarta	Tunjangan Kinerja bulan Desember 2012	Rp 1.445.460.000
		Uang makan pegawai bulan Desember 2012	Rp 236.295.000
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.681.755.000</b>

Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut keseluruhannya telah dibayarkan kepada pegawai berupa tunjangan kinerja dan uang makan pegawai bulan Desember 2012 pada bulan Januari 2013 serta sisanya berupa pengembalian tunjangan kinerja sebesar Rp 37.267.501,00 disetor ke rekening Kas Negara tanggal 9 Januari 2013 (NTPN.0602091412030503) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23  
Rincian Penyetoran Kas di Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Uraian Satker	Saldo per 31 Desember 2012	Pembayaran	Saldo	Penyetoran Ke KUN
1	ANRI Jakarta	Rp 1.445.460.000	Rp 1.408.192.499	Rp 37.267.501	Rp 37.267.501
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.445.460.000</b>	<b>Rp 1.408.192.499</b>	<b>Rp (1.445.460.000)</b>	<b>Rp 37.267.501</b>

#### C.1.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak  
Rp223.150.531,00

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp223.150.531,00 dan Rp0 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Piutang Bukan Pajak pada ANRI, keseluruhannya merupakan piutang PNBPer per 31 Desember 2012 berasal dari PNBPer terutang oleh Yayasan Gedung ANRI sebagaimana Surat BPKP Nomor S-1125/D2/04/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp 233.150.531,00 (lihat daftar lampiran XVII).

### C.1.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Bukan Pajak  
Rp1.115.752,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp1.115.752,00 dan Rp0 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang.

Berikut disajikan perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek :

Tabel 24  
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	1	Rp 223.150.531	0,5%	Rp1.115.752
<b>Total</b>			<b>Rp 223.150.531</b>		<b>Rp1.115.752</b>

### C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bag. Lancar TP/TGR  
Rp2.964.288,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp2.964.288,00 dan Rp0 yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 25  
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Satker

No.	Satker	Jumlah Debitur	Jumlah
1	ANRI Jakarta	1 orang	Rp0
2	ANRI UPT BATA	1 orang	Rp2.964.288
<b>Jumlah</b>			<b>Rp2.964.288</b>

Sedangkan mutasi Bagian Lancar TP/TGR pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>Rp0,00</b>
Mutasi tambah:	
- Tindaklanjut TGR atas SK Kepala ANRI No.HK.01.02/70/2012 tanggal 7 Mei 2012 pada Satker ANRI Jakarta	Rp2.890.000,00
- Tindaklanjut TGR atas SK Kepala ANRI No.HK.01.02/108/2012 tanggal 19/9/ 2012 pada Satker ANRI BATA	Rp3.952.384,00
Jumlah Mutasi Tambah :	Rp6.842.384,00
Mutasi kurang:	
- Pelunasan TGR pada Satker ANRI Jakarta	Rp2.890.000,00
- Pembayaran TGR pada Satker ANRI BATA bln September s.d Desember 2012	Rp988.096,00
Jumlah Mutasi Kurang :	Rp3.878.096,00
<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp2.964.288,00</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah sebesar Rp6.842.384,00 merupakan Bagian Lancar TGR 2 (dua) orang atas kehilangan kendaraan roda 2 (dua) pada satker ANRI Jakarta dengan nilai sebesar Rp2.890.000,00 sebagai tindaklanjut Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor HK.01.02/70/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan pada satker UPT BATA sebesar Rp3.952.384,00 sebagai tindaklanjut Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor HK.01.02/108/2012 tanggal 19 September 2012 (lampiran XIII).
- Mutasi pengurangan sebesar Rp3.878.096,00 merupakan pelunasan TGR pada Satker ANRI Jakarta sebesar Rp2.890.000,00 dan pembayaran TGR pada Satker UPT Balai Arsip Tsunami Aceh (September s.d Desember 2012) sebesar Rp988.096,00.

#### **C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih – Bag.  
Lancar TP/TGR  
Rp14.821,00*

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 14.821,00 dan Rp 0 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas piutang.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk debitur yang berasal dari satker ANRI UPT BATA:

Tabel 26  
Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	1	2.964.288	0,5%	14.821
<b>Total</b>			<b>2.964.288</b>		<b>14.821</b>

### C.1.8 Persediaan

Persediaan  
Rp670.406.839,00

Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar Rp 670.406.839,00 dan Rp 864.181.177,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 27  
Rincian Persediaan

No.	Uraian	2012	2011
1	Barang Konsumsi	Rp 494.958.366	Rp 722.490.614
2	Barang Untuk Pemeliharaan	Rp 115.525.450	Rp 121.304.600
3	Suku Cadang	Rp -	Rp -
4	Bahan Baku	Rp 44.081.250	Rp -
5	Persediaan Lainnya	Rp 15.841.773	Rp 20.385.963
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 670.406.839</b>	<b>Rp 864.181.177</b>

Persediaan tersebut berasal dari hasil stock opname fisik akhir tahun pada gudang barang Satker ANRI Jakarta sebesar Rp 662.785.307,00 dan Satker Balai Arsip Tsunami Aceh (BATA) sebesar Rp 7.621.532,00.

### C.2 Aset Tetap

Aset Tetap  
Rp 569.940.089.786,00

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp569.940.089.786,00 dan Rp562.006.936.786,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap ANRI per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 28  
Rincian Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2012	31 Desember 2011	Kenaikan/ Penurunan
1	Tanah	215,554,860,396	215,554,860,396	0
2	Peralatan dan Mesin	157,278,538,416	153,677,534,384	3,601,004,032
3	Gedung dan Bangunan	175,871,756,557	171,740,978,274	4,130,778,283
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	13,419,676,529	13,407,489,629	12,186,900
5	Aset Tetap Lainnya	7,815,257,888	7,626,074,103	189,183,785
<b>Jumlah</b>		<b>569,940,089,786</b>	<b>562,006,936,786</b>	<b>7,933,153,000</b>

### C.2.1 Tanah

Tanah  
Rp215.554.860.396,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki ANRI per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp215.554.860.396,00 dan Rp215.554.860.396,00. Terdapat Belanja Modal Tanah sebesar Rp48.200.000,00 berupa studi kelayakan rencana pengadaan tanah untuk gedung penyimpanan arsip pada Pusat Jasa Kearsipan yang belum kami catat sebagai penambah nilai tanah karena tidak ada pembelian tanah pada tahun 2012 dan tahun yang akan datang.

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang pada tahun 2012, sehingga saldo tanah per 31 Desember 2012 seluas 32.625 m<sup>2</sup> atau senilai Rp215.554.860.396,00 tersebut rinciannya berupa:

- tanah di jalan gajah mada seluas 9.340 m<sup>2</sup> senilai Rp.111.146.000.000,00
- tanah di jalan ampera raya seluas 18.245 m<sup>2</sup> senilai Rp.72.980.000.000,00
- tanah di pusdiklat kearsipan ANRI di bogor seluas 3.371 m<sup>2</sup> senilai Rp.25.042.860.000,00
- Tanah rumah negara golongan II di Ragunan seluas 979 m<sup>2</sup> senilai Rp.3.819.200.396,00
- tanah jalan khusus kompleks rumah negara seluas 690 m<sup>2</sup> senilai Rp.2.566.800.000,00

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin  
Rp157.278.538.416,00

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 adalah senilai Rp 157.278.538.416,00 atau 14.276 unit dan saldo per 31 Desember 2011 senilai Rp 153.677.534.384,00 atau 13.746 unit terjadi mutasi tambah sebanyak 936 unit atau senilai Rp 10.863.854.170,00 dan terjadi mutasi

kurang sebanyak 406 unit atau senilai Rp 7.262.850.138,00

Mutasi Tambah maupun Mutasi Kurang nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>153,677,534,384</b>
Mutasi tambah:	
- pembelian	4,121,931,750
- transfer masuk	6,741,922,420
Mutasi kurang:	
- penghentian aset dari penggunaan	(497,987,913)
- penghapusan	(22,939,805)
- transfer keluar	(6,741,922,420)
<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>157,278,538,416</b>

Sedangkan transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

- a. Penambahan dari pembelian sebesar Rp 4.121.931.757.890,00 dan transfer masuk penyerahan peralatan dan mesin ex BRR sebesar Rp6.741.922.420,00.

Nilai Pembelian sebesar Rp. 4.121.931.750,00 meliputi rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Alat bantu	2 unit	1,980,000
2	Alat angkutan darat bermotor	3 unit	358,669,000
3	Alat angkutan darat tak bermotor	2 unit	2,000,000
4	Alat bengkel bermesin	2 buah	5,399,250
5	Alat bengkel tak bermesin	3 buah	6,292,000
6	Alat ukur	3 buah	46,385,000
7	Alat kantor	161 buah	709,666,050
8	Alat rumah tangga	219 buah	724,218,900
9	Alat studio	43 buah	370,097,200
10	Alat komunikasi	12 buah	24,811,000
11	Unit alat laboratorium	7 buah	19,076,500
12	Unit alat laboratorium kimia nuklir	1 buah	4,500,000
13	Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika	2 buah	14,484,900
14	Alat laboratorium standarisasi kalibrasi & instrumentasi	2 buah	4,668,000
15	Alat khusus kepolisian	1 buah	2,475,000
16	Komputer unit	118	1,502,276,900
17	Peralatan komputer	91 buah	288,367,050
18	Alat eksplorasi topografi	1 buah	3,945,000
19	Alat kerja penerbangan	2 buah	1,840,000
20	Unit peralatan proses/produksi	2 buah	30,780,000

Nilai pembelian tersebut termasuk dari transaksi belanja barang pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi peralatan dan mesin per 31

Desember 2012 sebesar Rp4.026.000,00 pada satker Balai Arsip Tsunami Aceh.

Adapun Transfer Masuk sebesar Rp. 6.741.922.420,00 meliputi rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Alat angkutan darat bermotor	3 unit	485,671,430
2	Alat kantor	110 buah	5,886,516,790
3	Alat rumah tangga	119 buah	173,571,200
4	Komputer unit	13 buah	174,900,000
5	Peralatan komputer	14 buah	21,263,000

- b. Pengurangan dari penghentian peralatan dan mesin sebesar Rp497.987.913,00, penghapusan 2 (dua) unit sepeda motor yang hilang pada Satker ANRI Jakarta dan UPT BATA sebesar Rp22.939.805,00 dan transfer keluar penyerahan peralatan dan mesin ex BRR sebesar Rp6.741.922.420,00.

Nilai Penghapusan sebesar Rp. 22.939.805,00 meliputi rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Alat angkutan darat bermotor	2 Unit	22,939,805

Transfer keluar sebesar Rp. 6.741.922.420,00 meliputi rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Alat angkutan darat bermotor	3 unit	485,671,430
2	Alat kantor	110 buah	5,886,516,790
3	Alat rumah tangga	119 buah	173,571,200
4	Komputer unit	13 buah	174,900,000
5	Peralatan computer	14 buah	21,263,000

Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp.497.987.913,00 meliputi rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Alat kantor	23 buah	95,798,009
2	Alat rumah tangga	46 buah	25,400,338
3	Alat studio	12 buah	30,057,749
4	Unit alat laboratorium	5 buah	1,862,510
5	Komputer unit	30 buah	271,322,842
6	Peralatan computer	29 buah	73,546,465

Transaksi transfer masuk dan transaksi keluar digunakan untuk mencatat penyerahan BMN berupa peralatan dan Mesin ex BRR, dari

satker Arsip Nasional RI Jakarta ke Balai Arsip Tsunami Aceh.

Selanjutnya transaksi penghentian aset dari penggunaan merupakan transaksi untuk mereklasifikasi peralatan dan mesin yang rusak berat ke akun aset lain-lain.

### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan  
Rp175.871.756.557,00

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 adalah senilai Rp175.871.756.557,00 atau 39 unit dan per 31 Desember 2011 senilai Rp171.740.978.274,00 atau 39 unit terjadi mutasi tambah sebanyak 1 unit atau senilai Rp.19.927.814.400,00 dan terjadi mutasi kurang sebanyak 1 Unit atau senilai Rp.16.036.388.000,00.

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>Rp171,740,978,274.00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- transfer masuk	Rp16,036,388,000.00
- pengembangan melalui nilai aset	Rp4,112,883,283.00
- pengembangan melalui KDP	Rp17,895,000.00
<b>Mutasi kurang:</b>	
- transfer keluar	(Rp16,036,388,000.00)
<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp175,871,756,557.00</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. penambahan dari transaksi transfer masuk digunakan untuk mencatat penyerahan BMN berupa Bangunan kantor permanen ex BRR ke satker Arsip Nasional RI Jakarta;

Nilai transfer masuk sebesar Rp.16.036.388.000,00 meliputi rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Bangunan gedung tempat kerja	1 Unit	16.036.388.000

- b. penambahan dari pengembangan nilai aset terdiri dari pengembangan nilai aset di satker Balai Arsip Tsunami Aceh sebesar Rp 115.322.000,00 dan pengembangan nilai aset di satker Arsip Nasional RI Jakarta sebesar Rp.3.997.561.283,00. Nilai pengembangan aset di Satker ANRI Jakarta tersebut termasuk nilai

kapitalisasi belanja barang pemeliharaan yang dikapitalisasi per 31 Desember 2012 sebesar Rp 278.676.883,00.

Nilai pengembangan nilai aset sebesar Rp. 4.112.883.283,00 meliputi rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Bangunan gedung tempat kerja	0 Unit	3.954.228.400
2	Tugu/tanda batas	0 Unit	158.654.883

- c. penambahan dari pengembangan melalui KDP untuk mengakui pengembangan nilai gedung di satker Balai Arsip Tsunami Aceh karena pada saat transaksi belum ada penyerahan gedung dari Arsip Nasional RI Jakarta ke Balai Arsip Tsunami Aceh;

Nilai pengembangan melalui KDP sebesar Rp. 17.895.000,00 meliputi rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Bangunan gedung tempat kerja	0 Unit	17.895.000

- d. Mutasi kurang berupa transfer keluar untuk mencatat penyerahan BMN berupa Bangunan kantor permanen ex BRR, dari satker Arsip Nasional RI Jakarta ke Balai Arsip Tsunami Aceh.

Nilai transfer keluar sebesar Rp. 16.036.388.000,00 meliputi rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Bangunan gedung tempat kerja	1 Unit	16.036.388.000

#### C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp13.419.676.529,00 dan Rp13.407.489.629,00. Saldo per 31 Desember 2012 tersebut terdiri dari jalan dan jembatan Rp744.220.771,00 atau 2.024 m<sup>2</sup>, irigasi sebesar Rp473.380.400,00 atau 5 unit dan jaringan sebesar Rp12.202.075.358,00 atau 47 unit. Tidak terjadi perubahan nilai terhadap jalan, namun terdapat penambahan irigasi berupa pembuatan saluran air kotor di satker Balai Arsip Tsunami Aceh sebesar Rp12.186.900,00 atau 1 unit dan penambahan serta pengurangan nilai jaringan berupa transfer masuk dan keluar sebesar Rp2.889.920.000,00 atau 1 unit untuk mencatat penyerahan BMN yaitu instalasi pembangkit listrik

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp13.419.676.529,00

kapasitas sedang/generator ex BRR dari satker Arsip Nasional RI Jakarta ke Balai Arsip Tsunami Aceh dan sebaliknya.

### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya  
Rp7.815.257.888,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp7.815.257.888,00 atau 2.473 buah dan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp7.626.074.103,00 atau 2.259 buah terjadi mutasi tambah sebanyak 214 buah atau senilai Rp 189.183.785,00 yang berasal dari pembelian berupa buku dan alat musik dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Bahan perpustakaan tercetak	203	122,375,685
2	Bahan perpustakaan terekam dalam bentuk mikro	1 buah	6,325,000
3	Barang bercorak kesenian	10 buah	60,483,100

### C. 3 Piutang Jangka Panjang

#### C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Ganti Rugi  
Rp1.976.188,00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.976.188,00 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 29  
Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per Eselon I

No.	Unit Eselon I	Jumlah
1	ANRI	Rp1.976.188,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.976.188,00</b>

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>Rp0.00</b>
Mutasi tambah:	
- TGR melalui SK Kepala ANRI No.HK.01.02/70/2012 tanggal 7 Mei 2012 pada Satker ANRI Jakarta	Rp2,890,000.00
- TGR melalui SK Kepala ANRI No.HK.01.02/108/2012 tanggal 19/9/ 2012 pada Satker ANRI BATA	Rp5,928,576.00
Jumlah Mutasi Tambah :	Rp8,818,576.00
Mutasi kurang:	
- Pelunasan TGR pada Satker ANRI Jakarta	Rp2,890,000.00
- Pembayaran TGR pada Satker ANRI BATA bln September s.d Desember 2012	Rp988,096.00
- Bagian lancar TGR pada Satker ANRI BATA	Rp2,964,288.00
Jumlah Mutasi Kurang :	Rp6,842,384.00
<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp1,976,192.00</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah sebesar Rp8.818.572,00 merupakan TGR kepada 2 (dua) orang atas kehilangan kendaraan roda 2 (dua) pada satker ANRI Jakarta dengan nilai TGR sebesar Rp2.890.000,00 sesuai dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor HK.01.02/70/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan pada satker UPT BATA sebesar Rp5.928.576,00 sesuai dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor HK.01.02/108/2012 tanggal 19 September 2012.
- Mutasi pengurangan sebesar Rp6.842.384,00 merupakan pelunasan TGR pada Satker ANRI Jakarta sebesar Rp2.890.000,00 dan pembayaran TGR pada Satker UPT BATA (September s.d Desember 2012) sebesar Rp988.096,00 serta bagian lancar TGR pada Satker BATA sebesar Rp 2.964.288,00.

### **C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*Penyisihan Piutang  
tak Tertagih -  
Tuntutan Ganti Rugi  
Rp9.881,00*

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp9.881,00 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk debitur yang berasal dari Satker UPT BATA:

Tabel 30  
Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	Lancar	1.976.188	0,5%	9.881
<b>Total</b>			<b>1.976.188</b>		<b>9.881</b>

#### C.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya

Rp12.947.021.524,00

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp 12.947.021.524,00 dan Rp 19.606.851.224,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri atas:

Tabel 31  
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	2012	2011	Kenaikan/Penurunan
1	Aset Tak Berwujud	Rp 12,659,577,325	Rp 11,324,654,375	Rp 1,334,922,950
2	Aset Lain-Lain	Rp 287,444,199	Rp 8,282,196,849	Rp (7,994,752,650)
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 12,947,021,524</b>	<b>Rp 19,606,851,224</b>	<b>Rp (6,659,829,700)</b>

#### C.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Rp12.659.577.325,00

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp 12.659.577.325,00 dan Rp 11.324.654.375,00 . Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup ANRI berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian ATB per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 32  
Rincian Aset tak Berwujud per Eselon I  
(dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>11,324,654,375</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- Pembelian Software	162,350,000
- pengembangan aplikasi/digitalisasi	1,172,572,950
<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>12,659,577,325</b>

Terdapat mutasi tambah untuk aset tidak berwujud selama tahun 2012 sebesar Rp 1.334.922.950,00 berasal dari pembelian sebesar Rp.162.350.000,00 berupa software anti virus 4 unit senilai Rp 3.600.000,00 dan aset tak berwujud lainnya 4 unit senilai Rp 158.750.000,00 dan pengembangan sebesar

Rp 1.172.572.950,00 berupa pengembangan aplikasi serta digitalisasi pada satker ANRI Jakarta. Nilai pengembangan tersebut termasuk belanja barang yang dikapitalisasi berupa alih media buku antiquariat sebesar Rp 52.500.000,00.

#### C.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain  
Rp 287.444.199,00

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2012 adalah senilai Rp 287.444.199,00 atau 2 unit dan saldo per 31 Desember 2011 senilai Rp 8.282.196.849,00 atau 405 unit. Pada tahun 2012 terjadi mutasi tambah sebanyak 145 unit atau senilai Rp.497.987.913,00 dan terjadi mutasi kurang sebanyak 548 unit atau senilai Rp 8.492.740.563,00.

### KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka  
Pendek

#### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

##### C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp 2.020.211.749,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 2.020.211.749,00 dan Rp 1.589.126.556,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 33  
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp17.036.230	Kekurangan pembayaran gaji berkala bulan bulan Oktober s.d Nopember 2012 pada 19 pegawai dan kekurangan gaji bulan Oktober 2012 pada 53 pegawai
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp321.420.519	Pembayaran tagihan listrik kantor Pusdiklat Kearsipan Bogor, tagihan listrik dan tagihan telekomunikasi bulan Desember 2012
3	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp1.681.755.000	Akun penyeimbang kas lainnya dan setara kas
<b>Total</b>		<b>Rp2.020.211.749</b>	

##### C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari  
KPPN  
Rp 11.940.000,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 11.940.000,00 dan Rp 341.292.393,00 merupakan UP/TUP

yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN sebesar Rp 11.940.000,00 tersebut berasal dari:

- a. Satker BPAD Provinsi Banten sebesar Rp 12.000.000,00  
Nilai sebesar Rp 12.000.000,00 berasal dari dana UP/TUP yang belum di GU-nihilkan.
- b. Satker KAD Provinsi Kepulauan Riau sebesar minus Rp 60.000,00  
Nilai sebesar minus Rp 60.000,00 tersebut berasal dari dana UP/TUP sebesar Rp 48.060.000,00 yang telah di GU-nihilkan sebesar Rp 41.781.200,00 dan sisanya sebesar Rp 6.278.800,00 telah disetor ke Kas Negara dengan pengembalian UP/TUP sebesar Rp 6.338.800,00 (terdapat kelebihan setor pengembalian UP/TUP sebesar Rp 60.000,00).

### **C.5.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan**

*Pendapatan Yang  
Ditangguhkan  
Rp343.000.000,00*

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 343.000.000,00 dan Rp 16.482.806,00 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan oleh Bendahara Penerimaan pada Satker ANRI Jakarta berupa PNBP sewa tanah, gedung dan bangunan.

## **EKUITAS**

*Ekuitas Dana Lancar  
Rp 556.934.336,00*

### **C.6 Ekuitas Dana Lancar**

#### **C.6.1 Cadangan Piutang**

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 224.984.246,00 dan Rp0 merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

#### **C.6.2 Cadangan Persediaan**

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 670.406.839,00 dan Rp 864.181.177,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan.

#### **C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek**

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar minus Rp338.456.749,00 dan minus Rp1.334.407.556,00 Perkiraan tersebut

merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

## **C.7 Ekuitas Dana Investasi**

*Ekuitas Dana  
Investasi  
Rp582.889.077.617,00*

### **C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap**

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp569.940.089.786,00 dan Rp562.006.936.786,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

### **C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya**

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp12.948.987.831,00 dan Rp19.606.851.224,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

## **D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **D.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK**

Sebagaimana Laporan Hasil Pemantauan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2012 pada Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 48/HP/XVI/01/2013 tanggal 29 Januari 2013, terdapat 38 (tiga puluh delapan) temuan dengan 52 (lima puluh dua) rekomendasi yang terdiri atas 41 (empat puluh satu) rekomendasi yang telah sesuai ditindaklanjuti senilai Rp 1.561.417.772,91 dan terdapat 11 (sebelas) rekomendasi yang belum sesuai ditindaklanjuti. Tindak Lanjut LHP BPK pada ANRI meliputi :

- a. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2004 dengan Nomor LHP 18/XIII/09/2005 tanggal 5 September 2005. LHP tersebut mengungkapkan dua temuan dengan tiga rekomendasi, sedangkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi;
- b. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2005 dengan Nomor LHP 25/HP/XIII/06/2006 tanggal 19 Juni 2006. LHP tersebut mengungkapkan dua temuan dengan dua rekomendasi, sedangkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak satu;
  - 2) Tindak lanjut yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak satu.
- c. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2006 dengan Nomor LHP 40/HP/XIII/06/2007 tanggal 27 Juni 2007. LHP tersebut mengungkapkan dua temuan dengan tiga rekomendasi, sedangkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi;
- d. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2007 dengan Nomor LHP 34/HP/XIII/04/2008 tanggal 30 April 2008. LHP tersebut mengungkapkan lima temuan dengan tujuh rekomendasi, sedangkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak empat;
  - 2) Tindak lanjut yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak tiga.
- e. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2008 dengan Nomor LHP 46/HP/XIII/04/2009 tanggal 30 April 2009. LHP tersebut mengungkapkan empat temuan dengan lima rekomendasi, sedangkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi;
- f. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2009 dengan Nomor LHP 61/HP/XIII/05/2010 tanggal 20 Mei 2010. LHP tersebut mengungkapkan tujuh temuan dengan sembilan rekomendasi, sedangkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi;
- g. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2010 dengan Nomor LHP 99/HP/XIII/05/2011 tanggal 20 Mei 2011. LHP tersebut mengungkapkan delapan temuan dengan 12 rekomendasi, sedangkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak sembilan;

- 2) Tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak tiga.
- h. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2011 dengan Nomor LHP 99/HP/XVI/05/2012 tanggal 20 Mei 2012. LHP tersebut mengungkapkan delapan temuan dengan 11 rekomendasi, sedangkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak tujuh;
  - 2) Tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak empat.

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan ANRI sampai dengan Semester II Tahun 2012 sebagaimana dalam lampiran.

Selanjutnya ANRI telah melaporkan tindak lanjut penyelesaian atas Hasil Pemantauan TLHP BPK sampai dengan Semester II Tahun 2012 melalui surat Nomor PW.07.02/497/2013 tanggal 28 Maret 2013, sebagai berikut:

1. Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PAN, BPKP, BKN, LAN dan ANRI Tahun 2005 No. 25/HP/XII/06/2006 tanggal 19 Juni 2006 dan Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2007 No.34/HP/XVI/04/2008 tanggal 30 April 2008 yaitu pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

**Rekomendasi BPK:**

- a. BPK menyarankan agar Kepala ANRI melakukan negosiasi kembali dengan pihak Yayasan Gedung Arsip Nasional RI sebagai penyewa/pengelola aset negara di Jl. Gajah Mada dengan memperhitungkan kewajiban yayasan dalam memberikan kontribusi kepada negara sejak November 1998 sampai dengan tahun 2006, apabila dalam negosiasi tidak diperoleh kesepakatan agar kepala ANRI mengambil alih kembali hak pengelola aset negara di Jalan Gajah Mada No.111 dengan cara musyawarah dan mufakat atau menempuh jalur hukum.
- b. BPK RI menyarankan Kepala ANRI agar menarik kembali aset ANRI yang selama ini dikelola oleh pihak ketiga tanpa ada kontribusi ke Negara;
- c. BPK RI menyarankan Kepala ANRI agar segera membuat kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan Gedung ANRI dengan pihak Yayasan Gedung ANRI sebagai penyewa/pengelola

dengan memperhitungkan kewajiban yayasan dalam memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk PNBPN.

**Tindak Lanjut ANRI :**

- 1.a Kepala ANRI telah melakukan negosiasi kepada pihak Yayasan Gedung ANRI dan berdasarkan hasil rapat tanggal 29 September 2011 Pihak Yayasan Gedung ANRI tidak lagi melakukan aktivitas di Gedung ANRI tersebut dan seluruh aset menjadi tanggungjawab ANRI senilai Rp117.086.760.039,00.
- 1.b Kepala ANRI telah melakukan beberapa upaya untuk segera menyelesaikan seluruh aset itu, dan penarikan kembali Pada Yayasan Gedung ANRI dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa seluruh aset ANRI senilai Rp117.086.760.039,00 oleh Yayasan Gedung ANRI telah diambil dan dikuasai oleh ANRI sejak tanggal 29 September 2011.
  - b. Berkaitan dengan kontribusi Yayasan Gedung ANRI yang harus di setor ke kas negara dapat dijelaskan sebagai berikut:
    - 1) Pihak Yayasan Gedung ANRI telah menyetorkan kontribusi ke kas negara sebesar Rp2.100.000.000,00 (NTPN.1215050913060500 tanggal 30/04/2012).
    - 2) Pihak Yayasan Gedung ANRI masih mempunyai kewajiban sebesar Rp555.711.256,00 yang masih dijadikan persoalan namun demikian berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-292/KN/2013 tanggal 7 Maret 2013 bahwa kewajiban pihak Yayasan Gedung ANRI hanya sebesar Rp223.150.531,00, dengan penjelasan sebagai berikut:
      - a) Menteri Keuangan mengirimkan surat Nomor S-223/MK.6/2012 tanggal 1 Mei 2012 hal penanganan barang milik negara gedung ANRI di Jl. Gajah Mada no. 111, Jakarta Barat kepada ANRI, bahwa permohonan Yayasan Gedung ANRI tanggal 27 April 2012 tentang keberatan atas perhitungan PNBPN ANRI pada dasarnya tidak dikabulkan Menteri Keuangan;
      - b) Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tersebut, ANRI telah melakukan penagihan kepada Yayasan Gedung

ANRI atas kewajiban pembayaran kontribusi kepada negara sebanyak 2 (dua) kali yaitu Surat Nomor PW.02/980/2012 tanggal 28 Juni 2012 dan Surat Nomor PW.02/1187/2012 tanggal 16 Agustus 2012;

c) Pada tanggal 11 September 2012 ANRI menerima surat dari Yayasan Gedung ANRI hal permohonan peninjauan kembali atas PNBPN yang masih terhutang;

d) Berdasarkan surat dari Yayasan Gedung ANRI tersebut, ANRI telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan u.p. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor PW.07.02/1349E/2012 tanggal 24 September 2012 hal PNBPN terutang oleh Yayasan Gedung ANRI;

e) Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui surat Nomor : S-1125/D2/04/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal PNBPN terutang oleh Yayasan Gedung ANRI yang menyatakan bahwa yang dapat dipertimbangkan/diakui sebagai pengurang kewajiban kontribusi pembayaran kepada negara sepanjang biaya-biaya yang belum diakomodir tim setelah selesainya verifikasi tahap II secara riil dan nyata telah dikeluarkan oleh yayasan dalam periode waktu menunggu proses penyelesaian serah terima aset. Jumlah yang dapat dipertimbangkan/diakui sebagai pengurang kewajiban kontribusi pembayaran kepada negara adalah sebesar Rp363.125.363,00 (tidak termasuk Biaya Pajak Penghasilan atas Pesangon Pegawai Yayasan sebesar Rp223.150.531,00).

1.c Rekomendasi 1.c ini tidak *feasible* karena pihak ANRI tidak mempunyai kontrak perjanjian untuk pemakaian Gedung ANRI tersebut, karena Gedung ANRI tersebut akan dipakai untuk keperluan TUPOKSI ANRI sebagai kantor pusat/informasi penelitian VOC di Indonesia.

2. Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2007 No. 34/HP/XVI/08/2008 tanggal 30 April 2008, yaitu pada Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

**Rekomendasi BPK:**

BPK RI menyarankan kepada Kepala ANRI agar segera memprioritaskan pengurusan Sertifikat Tanah dan mengajukan anggaran untuk biaya persertifikatan atas tanah tersebut.

**Tindak Lanjut ANRI:**

Bahwa seluruh asset tetap ANRI berupa tanah telah disertifikatkan seluas 979 m<sup>2</sup>, mengenai tanah seluas 690 m<sup>2</sup> yang telah dipakai sebagai fasilitas umum/fasilitas sosial.

Sampai dengan saat ini ANRI masih menunggu jawaban atas Surat Nomor PL.07/394/2013 tanggal 15 Maret 2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ditembuskan kepada Deputi II Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI dan Kepala Kantor Wilayah BPN RI Provinsi DKI Jakarta perihal Mohon Penjelasan Tertulis atas Penggunaan Tanah untuk Fasilitas Jalan Umum.

3. Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2010 Nomor: 99/HP/XVI/05/2011 tanggal 20 Mei 2011, yaitu pada Sistem Pengendalian Intern.

**Rekomendasi BPK:**

- a. BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar memperbaiki Sistem Administrasi Pengelolaan PNBPN;
- b. BPK merekomendasikan kepada Kepala ANRI agar melakukan konfirmasi kembali kepada Provinsi-Provinsi yang Berita Acara Serah Terima (BAST)- nya tidak lengkap dan memperbaiki BAST serta memproses aset-aset yang telah diserahkan ke daerah melalui mekanisme hibah;
- c. BPK merekomendasikan kepada Kepala ANRI agar memperbaharui Daftar Barang Ruangan (DBR) pada kantor pusat ANRI di Jakarta dan Pusdiklat ANRI di Bogor serta melengkapi DBR tersebut pada tiap-tiap ruangan di ANRI.

**Tindak Lanjut ANRI :**

3.a Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK, ANRI telah memperbaiki sistem administrasi pengelola PNBPN berupa mekanisme penerimaan dan penyetoran PNBPN agar melaksanakan peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Kepala ANRI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Arsip Nasional Republik Indonesia.

- b. Prosedur Tetap Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penerimaan PNBP di lingkungan ANRI.
  - c. Keputusan Kepala ANRI Nomor KP.07/56/2012 tentang Penetapan Kasir pada Direktorat Pemanfaatan, Kasir pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Bogor, dan Kasir pada Pusat Jasa Kearsipan tanggal 9 April 2012.
  - d. Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2012 tentang pengelola PNBP Pusat Jasa Kearsipan.
- 3.b Saat ini ANRI telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan :
- a. ANRI telah menerima surat dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI nomor S-602/MK.S6/2012 tanggal 7 November 2012 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Arsip Nasional Republik Indonesia.
  - b. ANRI telah menindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Kepala ANRI Nomor HK.01.02/156/2012 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Karena Hibah tanggal 14 Desember 2012.
  - c. ANRI telah memperbaiki Berita Acara Serah Terima pada Lembaga Kearsipan Daerah penerima Hibah .
- 3.c Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK, ANRI telah membuat Daftar Barang Ruangan di lingkungan ANRI yaitu Kantor Pusat ANRI Jakarta dengan melengkapi DBR di tiap-tiap ruangan dan DBR di Pusdiklat ANRI di Bogor.
4. Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2011 Nomor: 99/HP/XVI/05/2012 tanggal 20 Mei 2012, yaitu pada Sistem Pengendalian Intern.

**Rekomendasi BPK:**

- 1) BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Pusat Jasa untuk mengikuti mekanisme penerimaan dan penyerahan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Merevisi kembali PP Nomor 42 Tahun 2005 tentang PNBP ANRI.

**Tindak Lanjut ANRI :**

- 4.a.1) Pusat Jasa Kearsipan telah mengikuti mekanisme penerimaan dan penyerahan PNBP sesuai dengan Prosedur Tetap ANRI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penerimaan

PNBP dan Prosedur Tetap ANRI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelola PNBP di Pusat Jasa Kearsipan.

4.a.2) ANRI telah mengusulkan revisi PP Nomor 42 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di ANRI dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Meminta usulan revisi melalui Surat Sekretaris Utama No. HK.01.02/632/2011 tanggal 14 April 2011;
- b. Kementerian Keuangan telah mengundang ANRI dalam rapat pembahasan usulan revisi PP Nomor 42 Tahun 2005 pada tanggal 16 Mei 2011;
- c. Sampai dengan saat ini ANRI masih melakukan pembahasan dengan pihak Kementerian Keuangan.

**Rekomendasi BPK atas** Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) BPK merekomendasikan kepada Kepala ANRI agar merevisi kembali PP Nomor 42 Tahun 2005 tentang PNBP ANRI.
- 2) Memerintahkan Sekretaris Utama ANRI segera memproses pinjam pakai BMN sesuai pengelolaan BMN.

**Tindak Lanjut ANRI :**

4.b.1). ANRI telah mengusulkan revisi PP Nomor 42 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di ANRI dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Meminta usulan revisi melalui Surat Sekretaris Utama No. HK.01.02/632/2011 tanggal 14 April 2011.
- b. Kementerian Keuangan telah mengundang ANRI dalam rapat pembahasan usulan revisi PP Nomor 42 Tahun 2005 pada tanggal 16 Mei 2011.
- c. Sampai dengan saat ini ANRI masih melakukan pembahasan dengan pihak Kementerian Keuangan.

4.b.2). Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK ANRI sedang memproses pengajuan ijin pinjam pakai BMN sesuai dengan pengelolaan BMN kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Matriks Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Atas Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2012 pada ANRI sebagaimana dalam lampiran.

## **D.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL**

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan, pendapatan dan belanja akrual pada Arsip Nasional Republik Indonesia TA. 2012 diantaranya sebagai berikut:

### **A. Tingkat Satuan Kerja**

#### **1. Pendapatan Akrual**

Pada Satuan Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (450448) per 31 Desember 2012 tidak terdapat pendapatan akrual .

#### **2. Belanja Akrual**

Pada Satuan Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (450448) masih terdapat belanja tunjangan fungsional PNS sebesar Rp17.036.230,00, belanja langganan listrik PLN sebesar Rp312.098.226,00 dan belanja langganan telekomunikasi sebesar Rp 9.322.293,00. Realisasi belanja tunjangan fungsional PNS (511124) Tahun 2012 sebesar Rp 820.825.000,00 dan belanja langganan listrik (522111) sebesar Rp 5.139.483.471,00 serta belanja langganan telepon (522112) sebesar Rp 169.714.136,00 sehingga jumlah belanja akrual Tahun 2012 berupa : belanja tunjangan fungsional PNS sebesar Rp 837.861.230,00, belanja langganan listrik sebesar Rp 5.451.581.696,00 dan belanja langganan telekomunikasi sebesar Rp 179.036.429,00.

Dengan demikian belanja yang masih harus dibayar terdiri atas : belanja langganan daya dan jasa sebesar Rp 338.456.749,00 disajikan sebagai dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek pada Neraca.

### **B. Tingkat Kementerian/Lembaga**

#### **1. Pendapatan Akrual**

Pada Arsip Nasional Republik Indonesia (087) per 31 Desember 2012 tidak terdapat pendapatan akrual .

#### **2. Belanja Akrual**

Pada Arsip Nasional Republik Indonesia (087) masih terdapat belanja tunjangan fungsional PNS sebesar Rp17.036.230,00, belanja langganan listrik PLN sebesar Rp 312.098.226,00 dan belanja langganan

telekomunikasi sebesar Rp 9.322.293,00. Realisasi belanja tunjangan fungsional PNS (511124) Tahun 2012 sebesar Rp 820.825.000,00 dan belanja langganan listrik (522111) sebesar Rp 5.435.592.271,00 serta belanja langganan telepon (522112) sebesar Rp 188.771.511,00 sehingga jumlah belanja aktual Tahun 2012 berupa : belanja tunjangan fungsional PNS sebesar Rp 837.861.230,00, belanja langganan listrik sebesar Rp 5.747.690.497,00 dan belanja langganan telekomunikasi sebesar Rp 198.093.804,00.

Dengan demikian belanja yang masih harus dibayar terdiri atas : belanja langganan daya dan jasa sebesar Rp 338.456.749,00 disajikan sebagai dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek pada Neraca.

Daftar informasi pendapatan dan belanja aktual disajikan sebagaimana dalam lampiran .

### **D.3 REKENING PEMERINTAH**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementrian Negara dan Lembaga, ANRI telah melakukan pendataan rekening sampai dengan 31 Desember 2012. Adapun rekening yang digunakan dalam kegiatan operasional ANRI sebagaimana terlampir dalam lampiran.

### **D.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Sampai dengan Laporan Keuangan Tahun 2012 ini disusun, ANRI tidak memiliki Badan Layanan Umum (BLU).

Arsip/Dokumen Negara yang ada pada ANRI merupakan Aset Bersejarah (*Heritage Assets*), dimana arsip yang dimaksud kiranya akan sulit dinilai dengan uang karena hakekatnya arsip memiliki nilai budaya, merupakan bahan pertanggungjawaban nasional, bukti sejarah, warisan budaya bangsa, bukti akuntabilitas, bukti sah di pengadilan, warisan nasional dan sebagai simpul pemersatu bangsa demi tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, sehingga sangat

sulit untuk dinilai harga dalam perhitungan uang. Adapun Kesanah Arsip/Dokumen Negara yang ada di ANRI dimaksud yang memiliki nilai guna sejarah sebagai berikut :

<u>Jenis Arsip</u>	<u>Jumlah</u>
1. Arsip Tekstual/Kertas	29.120 Meter Linier
2. Arsip Kartografik/Peta	97,425 Lembar
3. Arsip Film	55,869 Reel
4. Arsip Mikrofilm Negatif	9,932 Roll
Arsip Mikrofilm Positif	4,732 Roll
Arsip Mikrofische	7,200 Fische
5. Arsip Rekaman Suara	43,276 Kaset
Arsip Reel to reel sound	871 Reel
6. Arsip Video	27,350 Kaset
7. Arsip Foto	1,663,000 Lembar (Negatif dan cetak)
8. Arsip Optical Disc	2,120 Keping

Berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: HK.01.02/95/2012 Tentang Tim Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, maka pada tanggal 29 Agustus 2012 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satker ANRI Jakarta sebagai berikut:

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Gina Masudah. H
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Syaifuddin
Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Belanja Barang dan Modal	: Kahim Sundjaja
Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Pegawai	: Widenta. S
Atasan Langsung Bendaha Penerima Bendahara Pengeluaran	: Ali Sugeng : Dewi Santi. A
Bendahara Penerima	: Erma Sulistoningsih

Menjadi:

Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Belanja Barang dan Modal	: Tonny Agung. A
--	------------------

Berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: KP.07/354/2011, Keputusan Kepala Nomor KP.07/33/2012 dan Keputusan Kepala Nomor KP.07/356/2011, serta Keputusan Kepala Nomor KP.07/358/2012, Pejabat Pengelola/Pelaksana Anggaran pada Balai Tsunami Aceh Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran : Gina Masudah. H
- b. Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Sarip Hidayat
- c. Pejabat Pembuat Komitmen : Sri Yanah
- d. Bendahara Pengeluaran : Lisa Novianty

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta Tahun Anggaran 2012 Nomor 0050/087-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 mengalami beberapa kali revisi sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 DIPA ANRI Nomor 0050/087-01.1.01/00/2012 Satker ANRI Jakarta (450448) tanggal 5 Maret 2012;
- b. Rrevisi ke-2 tanggal 2 Mei 2012;
- c. Revisi ke-3 tanggal 21 Juni 2012;
- d. Revisi ke-4 tanggal 13 Juli 2012;
- e. Revisi ke-5 tanggal 28 Agustus 2012;
- f. Revisi ke-6 tanggal 25 September 2012;
- g. Revisi ke-7 tanggal 10 oktober 2012;
- h. Revisi ke-8 tanggal 17 Desember 2012.

Terdapat salah kewenangan pada DIPA satker Dekonsentrasi yaitu pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Irian Jaya, dimana tertulis Kantor Daerah (KD) yang seharusnya Dekonsentrasi (DK), sehingga mempengaruhi pagu dan realisasi satker KD maupun DK.

Tertulis dalam DIPA semula:

Kewenangan	Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Kantor Daerah (KD)	Balai Arsip Tsunami Aceh	2.528.956.000	2.148.504.738
Kantor Daerah (KD)	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Irian Jaya	160.541.000	160.541.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2.689.497.000</b>	<b>2.307.045.738</b>

Seharusnya tertulis dalam DIPA menjadi:

Kewenangan	Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Kantor Daerah (KD)	Balai Arsip Tsunami Aceh	2.528.956.000	2.148.504.738
Dekonsentrasi (DK)	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Irian Jaya	160.541.000	160.541.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2.689.497.000</b>	<b>2.307.045.738</b>

Dengan demikian satker Dekonsentrasi yang semula meliputi 31 daerah provinsi penerima dana dekonsentrasi menjadi 32 daerah dengan total pagu dan realisasi sebagai berikut:

Kewenangan	Jumlah Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Dekonsentrasi (DK)	32	4.800.000.000	4.667.228.738

Terdapat realisasi belanja barang (52) yang membentuk aset (53) dan menambah perolehan aset sebesar Rp91.825.000,00 yang belum dicatat pada Laporan Keuangan Semester I yang berasal dari Satker ANRI Jakarta, dan baru dicatat pada periode selanjutnya. Realisasi tersebut terdiri atas:

- a. Aset tak berwujud sebesar Rp 52.500.000,00 berupa kegiatan alih media buku antiquariat melalui SPM Nomor 00714 tanggal 09-05-2012 dan Nomor SP2D Nomor 111935X tanggal 24-05-2012;
- b. Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp 39.325.000,00 berupa pekerjaan perbaikan atap gedung melalui SPM Nomor 00706 tanggal 09-05-2012 dan Nomor SP2D Nomor 108003X tanggal 15-05-2012.

Selain itu terdapat pula belanja barang yang dikapitalisasi dari pemeliharaan peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 4.026.000,- pada Satker Balai Arsip Tsunami Aceh yang terdiri atas:

- a. Nomor SP2D 341984X tanggal 10-08-2012 berupa pembelian 1(satu) buah mesin pompa air sebesar Rp. 1.375.000,-
- b. Nomor SP2D 622553A tanggal 10-12-2012 berupa pembelian 1 (satu) buah Pompa Air sebesar Rp. 605.000,- dan 1 (satu) buah Tangki Air sebesar Rp. 1.155.000,-
- c. Nomor SP2D 627074A tanggal 21-12-2012 berupa pembelian 2 (dua) buah DC/AC Power Supply sebesar Rp. 528.000,- dan 1 (satu) buah Modem sebesar Rp. 363.000,-

Terdapat realisasi belanja barang (52) yang membentuk aset (53) dan menambah perolehan aset sebesar Rp 251.406.000,00 yang belum dicatat pada Laporan Keuangan ANRI tahun 2012 yang berasal dari Satker ANRI Jakarta. Realisasi tersebut terdiri atas:

- a. Pekerjaan Menara Air di Pusdiklat ANRI Bogor senilai Rp 45.717.000,00 melalui SPM Nomor 02439 tanggal 13-12-2012 dan SP2D Nomor 937724A;
- b. Perbaikan pagar belakang di Pusdiklat ANRI Bogor senilai Rp170.709.000,00 melalui SPM Nomor02441 tanggal 13-12-2012 dan SP2D Nomor937725A;
- c. Pembuatan gambar desain rehabilitasi/renovasi menara air asrama, pagar Pusdiklat ANRI Bogor senilai Rp34.980.000,00 melalui SPM Nomor02448 tanggal 14-12-2012 dan SP2D Nomor939580A.

Terdapat aset yang tidak dipergunakan dalam operasional pemerintahan berupa aset dihibahkan, telah mendapat persetujuan hibah dari Kementerian Keuangan melalui surat DJKN Nomor S-602/MK.6/2012 tanggal 7 Nopember 2012 hal Peresetujuan Hibah BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada ANRI serta telah dikeluarkan dari buku barang ANRI sebanyak 403 unit atau senilai Rp. 7.994.752.650,00 yang terdiri atas :

- Kendaraan Layanan Masyarakat Sadar Arsip sebanyak 16 unit/ Rp. 5.041.900.000 telah diserahkan ke 16 (enam belas) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Perlengkapan Pendukung Kendaraan Sadar Arsip sebanyak 288 unit / Rp. 1.768.800.000
- Perangkat Aplikasi Sistem Kearsipan Statis 99 unit/Rp. 1.184.052.650.

Aset yang tidak dipergunakan dalam operasional pemerintahan berupa aset dengan kondisi rusak berat, telah mendapat persetujuan penghapusan BMN ANRI dari Kementerian Keuangan melalui surat Kanwil VII DJKN Nomor S-63/MK.6/WKN.07/2012 tanggal 7 Oktober 2012 hal Persetujuan Hibah BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada ANRI dengan nilai perolehan Rp853.303.830 atau nilai buku SIMAK-BMN senilai Rp 499.187.913,00 (nilai tersebut termasuk ekstrakomptabel sebesar Rp1.200.000,00.

Sesuai Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor S-420/D2/04/2012

tanggal 5 Juni 2012 hal Penegasan atas Laporan Hasil Reviu Pemanfaatan Gedung ANRI Jl. Gajah Mada No.111 Jakarta Barat, Yayasan GANRI telah menyetorkan kewajibannya atas pemanfaatan gedung arsip ke rekening kas negara sebesar Rp 2.100.000.000,00 (NTPN 1215050913060500 tanggal 30-04-2012) dari kewajiban penyetoran sebesar Rp2.655.711.276,00. Sisanya sebesar Rp 555.711.276,00 telah dilakukan penagihan 2 (dua) kali oleh ANRI melalui Surat Nomor PW.02/980/2012 tanggal 28 Juni 2012 dan Surat Nomor PW.02/1187/2012 tanggal 16 Agustus 2012. Selanjutnya ANRI telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan u.p. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor PW.07.02/1349E/2012 tanggal 24 September 2012 hal PNBP terutang oleh Yayasan Gedung ANRI yang ditembuskan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagai tindaklanjutnya melalui Deputi Pengawasan Intansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP Nomor S-1125/D2/04/2012 tanggal 12 Desember 2012 Hal PNBP Terutang oleh Yayasan Gedung ANRI, terhadap permintaan keringanan pihak yayasan atas sisa sebesar Rp 586.275.894,00 yang dapat dipertimbangkan/diakui sebagai pengurang kewajiban kontribusi pembayaran kepada negara adalah sebesar Rp363.125.363,00 (tidak termasuk Biaya Pajak Penghasilan atas Pesangon Pegawai Yayasan sebesar Rp 223.150.531,00). Dengan demikian nilai sebesar Rp 223.150.531,00 merupakan bagian piutang PNBP ANRI Tahun 2012.

Dalam rangka pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Nilai Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-52/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada 20 (Dua Puluh) Kementerian Negara/Lembaga, ANRI telah melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari sampai dengan Desember 2012 beserta tunjangan kinerja ke-13 melalui SPM Nomor 02436 tanggal 14-12-2012 dan SP2D Nomor 941500A tanggal 20-12-2012 sebesar Rp 19.852.357.522,00 dengan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya dibayarkan melalui transfer bank kepada masing-masing pegawai yang berhak menerima sesuai dengan daftar tunjangan

kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari s.d Nopember 2012 dan bulan ke-13 kepada 527 pegawai sebesar Rp16.941.752.072,00;
- b. Pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2012 kepada 503 pegawai sebesar Rp1.408.192.499,00;
- c. Pembayaran Pph pasal 21 sebesar Rp1.465.145.450,00;
- d. Pengembalian belanja tunjangan kinerja sebesar Rp 37.267.501,00.

Adapun pagu dana yang dialokasikan untuk pembayaran tunjangan kinerja sesuai Revisi ke-8 DIPA ANRI T.A 2012 sebesar Rp 19.888.987.000,00. Dengan demikian realisasi pembayaran tunjangan kinerja yang tidak terserap sebesar Rp 36.629.478,00.